



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAPORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT



TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
KataPengantar	2
Bab I Pendahuluan	4
Visi dan Misi Komisi Informasi Jawa Barat	7
Pergantian Periode Komisi Informasi Jawa Barat	8
Bab II Pelaksanaan dan Capaian Program	10
2.1. Bidang Kelembagaan	10
2.1.1. Penguatan Kelembagaan	10
2.1.2. Kegiatan Kerjasama	13
2.1.3. Peningkatan Kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	15
2.1.4. Permohonan Informasi Publik ke Komisi Informasi	17
2.1.5. Pencapaian Target Kelembagaan	18
2.2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	19
2.2.1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	20
2.2.2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	26
2.2.3. Penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi Pasca Sengketa ..	29
2.2.4. Peningkatan tata kelola Penyelesaian sengketa Informasi Publik	30
2.2.4. Pencapaian Target Penyelesaian sengketa Informasi Publik	31
2.3. Bidang Sosialisasi dan Edukasi	32
2.3.1. Kegiatan Sosialisasi	32
2.3.2. Pencapaian Kegiatan Sosialisasi	39
2.4. Bidang Advokasi dan MONEV	41
2.4.1. Kegiatan Webinar	41
2.4.2. MONEV Penerapan Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik ...	44
2.4.3. Pencapaian Kegiatan Advokasi dan Monev	54
Bab III Penutup	56
Lampiran	57

KATA PENGANTAR

Salam Keterbukaan.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 28 ayat 2: “Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan”. Penyusunan Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam mengawal keterbukaan informasi di Jawa Barat. Selain itu, kami juga berharap dengan suksesnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melayani publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik maka otomatis kami ikut mendukung program Gubernur Jawa Barat, yaitu “Jabar Juara Lahir Dan Batin”.

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 mencakup informasi yang terlayani sepanjang tahun 2020, sarana pendukungnya, serta bentuk publikasi yang telah dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *website* dan media sosial, media cetak dan elektronik, serta komunikasi secara langsung.

Data yang dihimpun dalam laporan ini merupakan data dari Bulan Januari 2020 – Bulan November 2020 dari Kegiatan Bidang Kelembagaan, Bidang PSI, Bidang Sosialisasi dan Edukasi, serta Bidang Advokasi dan Monev di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini.

Diharapkan Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat ini.

Bandung, 30 November 2020
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,

Ijang Faisal

BAB I

PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan memaksa tradisi pemerintahan yang tertutup untuk berubah menjadi tradisi yang terbuka. Mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk membuka informasi publik, disampaikan dalam undang-undang ini. Adanya Keterbukaan Informasi Publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena keterbukaan informasi publik ini dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keberadaan Komisi Informasi dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) yang menyatakan

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka UU KIP memandatkan tugas bagi Komisi Informasi yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIP sebagai berikut

Komisi Informasi bertugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;*
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan*
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.*

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat kesadaran masyarakat Jawa Barat akan hak-haknya atas Informasi publik serta mendorong badan-badan publik di Provinsi Jawa Barat mulai dari badan publik di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota hingga badan publik tingkat kelurahan dan desa untuk transparan dan membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memperoleh Informasi publik.

Dalam mendorong hal ini, yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di tahun 2020 adalah fokus melakukan kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan *talkshow* di 14 kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih fokus melakukan kegiatan sosialisasi kepada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat.

Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan koordinasi kepada Komisi Informasi kabupaten/kota untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi di era Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengingat perkembangan penyebaran *Covid-19* telah mempengaruhi pelayanan publik khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Sebagai salah satu langkah penyampaian informasi publik, di tahun 2020 ini Komisi Informasi telah melakukan 185 kali pemuatan berita/*release* terkait program kerja, kegiatan, dan kebijakan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini. Keseluruhan pemuatan publikasi tersebut dilakukan dengan rincian pemuatan berita/*release* di 51 media cetak dan media *online*.

Kegiatan rutin tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap 148 Badan Publik se-Jawa Barat yang terdiri dari 6 (enam) jenis Badan Publik, yaitu:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat
3. Lembaga/Instansi Provinsi Jawa Barat
4. KPU Kabupaten/kota di Jawa Barat
5. Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Barat
6. Partai Politik Provinsi Jawa Barat

Selain itu, kegiatan yang juga dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun media sosial Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diantaranya *website*, *Instagram* dan *Facebook*.

Dengan demikian, sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terus ditingkatkan melalui beragam program Keterbukaan Informasi Publik. Harapannya, pelayanan kepada Publik dan Badan Publik dapat berjalan sesuai rencana untuk mendukung transparansi publik sesuai dengan selogan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, **“Kalau Bersih Kenapa Harus Risih!”**.

VISI DAN MISI

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Maju, Partisipatif, Dan Berkepribadian Melalui Komisi Informasi Jawa Barat Yang Mandiri Dan Berkeadilan Menuju Jawa Barat Juara Lahir Dan Bathin”

MISI

- Meningkatkan Kesadaran Kritis Masyarakat Jawa Barat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab serta aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan informasi
- Memperkuat Kelembagaan Komisi Informasi Jawa Barat melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan
- Mengoptimalkan Kualitas Kebijakan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
- Membangun Kemitraan dengan Stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi Menuju Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin
- Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik

PERGANTIAN PERIODE

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

Pada akhir tahun 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengalami pergantian periode Komisioner. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 821/Kep.1047–Diskominfo/2019, tentang pengangkatan Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 26 Desember 2019.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019 - 2023 dikukuhkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Aula Timur Gedung Sate. Di tempat dan tanggal yang sama, dilakukan pula agenda serah terima jabatan dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2015 - 2019 kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2023.



Foto 1. Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2023

Keputusan Gubernur dengan Nomor 821.1/Kep.722/Diskominfo/2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sekaligus memberhentikan dengan hormat sebagai

Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jabar Periode 2015 – 2019, sesuai, atas nama:

1. Drs. Dan Satriana;
2. Ijang Faisal, S.Ag., M.Si.;
3. Anne Friday Safaria, S.S., M.Si.;
4. Budi yoga permana, S.IP.; dan
5. Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si.,

Adapun Komisioner yang baru dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 821/Kep.1047–Diskominfo/2019 yaitu:

1. Ijang Faisal, S.Ag., M.Si.;
2. Husni Farhan Mubarak, S.H., M.Si.;
3. Yudaningsih, S.Ag., M.Si.;
4. Dedi Dharmawan, S.H., M.M.; dan
5. Dadan Saputra, S.Pd., M.Si.

BAB II

PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM

2. 1 Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan memiliki tugas melakukan koordinasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kerjasama dengan Komisi Informasi kabupaten/kota, dan Badan Publik se Jawa Barat, peningkatan sumber daya manusia dan sistem dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, serta kerjasama dengan media massa, baik cetak maupun *online* untuk penyampaian informasi secara rutin.

2.1.1. Penguatan Kelembagaan

Peran Komisi Informasi dalam keterbukaan informasi di Indonesia yang signifikan sebagai lembaga yang mengawal UU KIP dan menjamin hak akses informasi masyarakat Indonesia harus dilakukan penguatan dengan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat.

Penguatan kelembagaan di tahun 2020 ini, diawali dengan Kunjungan Audiensi dalam rangka pengenalan Komisioner Masa Periode 2019 – 2023 ke 5 Badan Publik di Provinsi Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut Komisi Informasi berharap bisa bersinergi dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pelayanan dengan Badan Publik tersebut.

Sempat terhenti karena kondisi Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, bidang Kelembagaan tidak banyak melakukan kunjungan secara langsung karena jumlah pasien yang terkena *Corona Virus Disease (Covid-19)* kian meningkat di Provinsi Jawa Barat, bahkan Indonesia. Namun setelah memasuki situasi *new normal*, bidang kelembagaan mulai melakukan kunjungan koordinasi ke Komisi Informasi kabupaten/kota dan 6 kunjungan ke Badan

Publik untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi di era Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengingat Perkembangan penyebaran Covid-19 telah mempengaruhi pelayanan publik khususnya di Provinsi Jawa Barat.

No	Kunjungan Kelembagaan	Maksud dan Tujuan
1	Komisi Informasi Pusat	Penyelesaian sengketa informasi di era pandemi Covid-19
2	Bupati Cianjur	Audiensi Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Bupati Cianjur
3	Komisi Informasi Kota Cirebon	Penyelesaian sengketa informasi di era pandemi Covid-19
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut	Perkembangan tentang keterbukaan informasi <i>Corona Virus Disease–19</i> (Covid-19) sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
5	Walikota Sukabumi	Perkembangan tentang keterbukaan informasi <i>Corona Virus Disease–19</i> (Covid-19) sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmlaya	Perkembangan tentang keterbukaan informasi <i>Corona Virus Disease–19</i> (Covid-19) sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
7	PPID Utama Kabupaten Cirebon	Perkembangan tentang keterbukaan informasi <i>Corona Virus Disease–19</i> (Covid-19) sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
8	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu	Perkembangan tentang keterbukaan informasi <i>Corona Virus Disease–19</i> (Covid-19) sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 1. Kunjungan Kelembagaan ke Badan Publik Tahun 2020

Tahun ini, Komisi Informasi juga menerima kunjungan kelembagaan dari Komisi Informasi Pusat dan 4 Komisi Informasi Daerah lain diantaranya, Komisi Informasi Jambi, Komisi Informasi Provinsi Sumatra Selatan, dan Komisi Informasi Provinsi Riau.



Foto 2. Kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatra Selatan

Pun tak kalah dengan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi Kabupaten Majalengka dan Kota Sukabumi serta PT. Kereta Api Indonesia yang juga melakukan kunjungan ke Komisi Informasi dengan Maksud Kunjungan seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2.

No	Kunjungan Kelembagaan	Maksud dan Tujuan
1	Komisi Informasi Provinsi Jambi	Silaturahmi dan Audiensi kelembagaan
2	Fatayat NU Provinsi Jawa Barat	Penjajakan Kerjasama antara Komisi Informasi dengan Fatayat NU
3	Komisi Informasi Provinsi Sumatra Selatan	FGD Terkait Informasi Covid-19
4	Diskominfo Majalengka dengan maksud	Membahas SOP selama Covid-19

5	PT. Kereta Api Indonesia	Kunjungan untuk Meningkatkan Pemahaman dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
6	Komisi Informasi Pusat	Kunjungan Kelembagaan
7	Komisi Informasi Provinsi Riau	Rapat Sinkronisasi Strategi Penanganan Sengketa Informasi Publik Di Tengah Kondisi Pandemi Covid-19

Tabel 2. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

2.1.2. Kegiatan kerjasama

Selain melakukan kunjungan ke Komisi Informasi kabupaten/kota upaya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Tahun 2020 ini adalah penguatan pada bidang kelembagaan dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa *stake holder*, antara lain melakukan MoU dan koordinasi kelembagaan dengan berbagai pihak, sesuai dengan yang dijelaskan pada tabel 3.

No	Tanggal	MoU Kerjasama
1	3 Februari 2020	MOU Komisi Informasi Jawa barat dengan <i>International Woman University (IWU)</i>
2	3 Februari 2020	MOU Komisi Informasi Jawa barat dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Provinsi Jawa Barat (ISKI)
3	9 Agustus 2020	MOU Komisi Informasi Jawa barat dengan Fatayat NU Jawa barat
4	10 September 2020	MOU Komisi Informasi Jawa barat dengan BAWASLU Jawa barat

Tabel 3. Nota Kesepahaman/ Mou dengan Badan Publik di Tahun 2020

Penyampaian informasi juga rutin dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui kerjasama dengan media massa, baik cetak maupun *online*. Antara lain dengan pemuatan berita/*release*. Kami telah melakukan 185 kali pemuatan

berita/*release* terkait program kerja, kegiatan, dan kebijakan dari Komisi Infomasi Provinsi Jawa Barat ini. Keseluruhan pemuatan publikasi tersebut dilakukan dengan rincian pemuatan berita/*release* di 51 (lima puluh satu) media cetak dan media *online*.

No	Media	Jumlah <i>Release</i>
1.	Bpkpnews.com	20
2.	Joernalinakor.com	12
3.	Metrojabar.id	12
4.	Wjtoday.com	11
5.	Indonesiaexpres.co.id	10
6.	Mbinews.id	10
7.	Prabunews.com	9
8.	Memberstvnews.com	9
9.	Timesindonesia.co.id	8
10.	Suaraindonesia.co.id	7
11.	InilahKoran.com	7
12.	TribunJabar.id	6
13.	Putraindonesia.com	5
14.	Jabaronline.com	4
15.	Fixindonesia.com	4
16.	Suaramudanews.com	4
17.	Fokussatu.id	3
18.	Seputarnews.com	2
19.	Pikiranrakyat.com	2
20.	Koransinarpagijuara.com	2
21.	Siliwangines.com	2
22.	Forumkeadilan.com	2
23.	Sisibaik.id	2
24.	Simmanews.com	2
25.	Nyarink.com	2
26.	Kabarbhayangkara.com	2
27.	Kabar.siberindo.com	2
28.	Mediapadjajaran.com	1
29.	Medikomonline.com	1
30.	Suarapasundan.com	1
31.	Sinarlantangnews.com	1
32.	Pasundannews.com	1
33.	RRI.co.id	1

34.	Tribuananews.com	1
35.	Detik-nusantara.com	1
36.	Detikindonesia.co	1
37.	Wartapembaruan.com	1
38.	Nusantarachannel.com	1
39.	Mediatopnews.com	1
40.	Penaku.id	1
41.	Bandungrayanews.com	1
42.	Suarajabar.com	1
43.	Infoindonesianews.com	1
44.	Wartaindonesia.com	1
45.	Pelitajabar.com	1
46.	Eljabar.com	1
47.	CnnIndonesia.com	1
48.	Patrolibins.com	1
49.	Transparantnews.com	1
50.	Moeslimchoice.com	1
51.	Bedanews.com	1
Total		185

Tabel 4. Media Cetak dan Media *Online*

2.1.3. Peningkatan Kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilakukan oleh Bidang Kelembagaan adalah:

No	Kegiatan	Peserta
1	Audensi Keterbukaan Informasi Publik dengan Pengadilan Negeri Bandung	Komisioner dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
2	Audensi Keterbukaan Informasi Publik dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Komisioner dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
3	Audensi Keterbukaan Informasi Publik dengan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat	Komisioner dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

4	<i>Focuss Group Discussion</i> (FGD) bidang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Indonesia	Komisioner dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
5	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Komisioner dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
6	Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2020	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
7	Rapat Koordinasi dengan BPKAD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pembahasan Mengenai Kelembagaan Komisi Informasi	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
8	Rapat Koordinasi dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pembahasan Mengenai Kelembagaan Komisi Informasi	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
9	Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se- Indonesia tahun 2020	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Tabel 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan

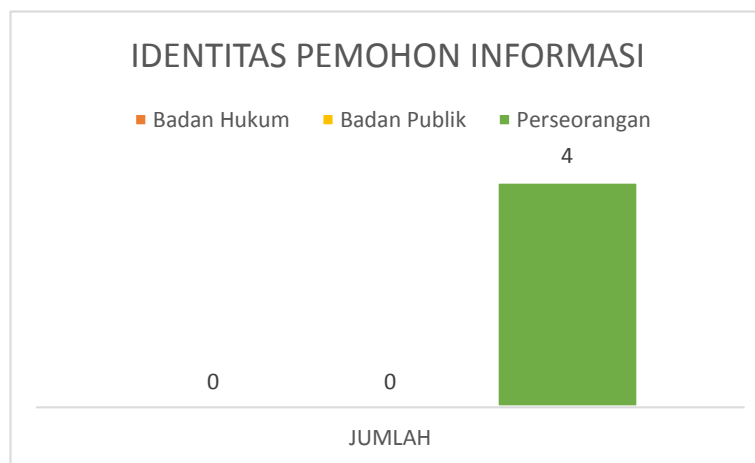
Bedasarkan tabel 5, dapat dilihat bawa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan Audiensi Keterbukaan Informasi sekaligus silaturahmi pengenalan Komisioner Masa Periode 2019 – 2023 ke Pengadilan Tinggi Negeri, Tata Usaha Negara Bandung, dan Ombudsman Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Bidang Kelembagaan juga melakukan Rapat Koordinasi dengan BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat.

Selain Rapat Koordinasi, pelaksanaan peningkatan kapasitas Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tahun 2020 ini telah menjadikan

seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengikuti bimbingan teknis mengenai Penyelesaian Sengketa informasi Publik karena bimbingan teknis tersebut berkaitan dengan tugas Komisioner yang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non-litigasi.

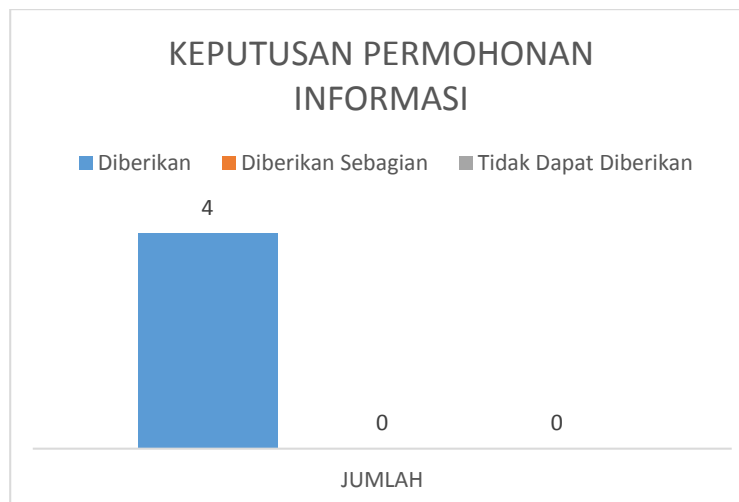
2.1.4. Permohonan Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Berbicara tentang Kelembagaan, selain program dan kegiatan yang dikelola oleh bagian kelembagaan, Permohonan Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga dikelola oleh Bidang Kelembagaan. Selama Tahun 2020, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah menerima 4 Permohonan Informasi di Tahun 2020 ini. Permohonan Informasi ini didominasi oleh Perseorangan seperti yang dijelaskan pada grafik 1.



Grafik 1. Identitas Pemohon Informasi Tahun 2020

Informasi yang diminta oleh Pemohon semuanya merupakan informasi yang terbuka. Dari 4 orang Pemohon informasi, 3 diantaranya meminta informasi mengenai hasil Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan satu Pemohon sisanya, meminta informasi Jumlah Data Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2015 – 2019. Seluruh permintaan informasi tersebut diberikan seluruhnya dengan masa tenggat waktu dibawah 10 hari seperti yang terlihat pada grafik 2.



Grafik 2. Keputusan Permohonan Informasi

2.1.5. Pencapaian Target Kelembagaan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan pembahasan terkait kelembagaan dengan Komisi Informasi Pusat dan 4 (empat) Komisi Informasi Daerah lain. Pun tak kalah dengan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jawa Barat, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi serta PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan kemitraan dengan 1 (satu) perguruan tinggi dan 3 (tiga) Badan Publik lainnya untuk mendorong penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengingat akan ada Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada akhir tahun 2020.

Selain melakukan beberapa kerjasama dengan Badan Publik, Komisi Informasi pun sudah melakukan kerja sama dengan media dengan media masa maupun online dengan jumlah berita/release sebanyak 185 release.

Target yang belum tercapai adalah dukungan pengadaan sarana dan administrasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang belum sesuai dengan target, seperti pengadaan gedung kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,

pengadaan database digital, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Petugas Kepaniteraan, dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

2. 2 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 26 Ayat 1 Komisi Informasi bertugas: a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat luas baik masyarakat Jawa Barat maupun diluar Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah membentuk Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).

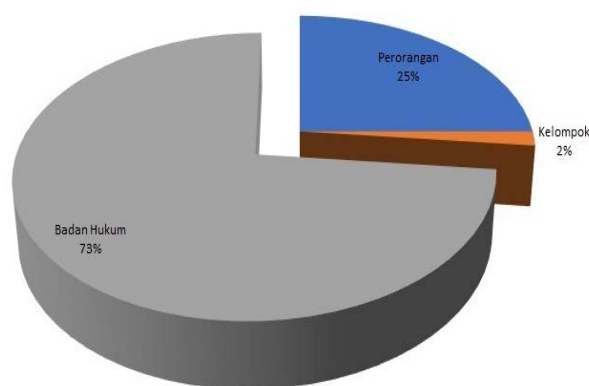
Bidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang menjadi tanggungjawab bidang ini adalah pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik dan peningkatan kualitas layanan penyelesaian sengketa informasi publik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi:

- Pasal 6 ayat (2): Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
- Pasal 7 ayat (1): Komisi Informasi Provinsi dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya.
- Pasal 20 ayat (1): Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator

2.2.1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai di Bulan November 2020, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima pengajuan sebanyak 60 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.



Grafik 3. Identitas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2020

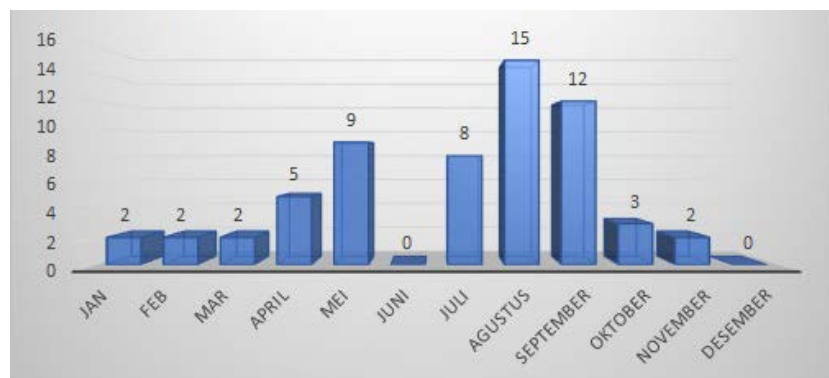
Dari data di atas terlihat, bahwa jumlah Permohonan Sengketa Informasi terjadi pada tahun 2020 didominasi oleh Badan Hukum dengan persentase 73% permohonan dengan jumlah 44 Permohonan. Permohonan yang diajukan oleh Kelompok dan Perseorangan dijelaskan pada tabel 6.

No	Identitas Pemohon	Jumlah
1	Perorangan	15
2	Kelompok	1
3	Badan Hukum	44
Total		60

Tabel 6. Identitas Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2020

Dari 60 Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, tidak semua permohonan tersebut di registrasi. Terdapat satu sengketa yang tidak diregistrasi dan keluar Akta tidak Registrasi karena Tidak memenuhi/tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Selain rincian identitas dari Pemohon, data Permohonan Sengketa Informasi juga dihitung berdasarkan kurun waktu seperti yang dijelaskan pada grafik sebagai berikut



Grafik 4. Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan kurun waktu dari Januari sampai dengan November Tahun 2020

Berdasarkan grafik 4, terlihat bahwa Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan kurun waktu dari Januari sampai dengan November Tahun 2020, jumlah permohonan paling tinggi berada di bulan Agustus sebanyak 15 kasus.

No	Alasan Pengajuan	Jumlah
1	Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 UU	-
2	Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU KIP	2
3	Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon	32
4	Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas Keberatan	9
5	Pengenaan biaya yang tidak wajar	-
6	Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP	3
7	Alasan point 1 & 4 diatas	1
8	Alasan point 1,2,3 & 4 diatas	3
9	Alasan point 2 & 4 diatas	7
10	Alasan point 2 & 3 diatas	1
11	Alasan point 2,3 & 4 diatas	1
12	Tidak disampaikan alasan	1
Total		60

Tabel 7. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Jika dilihat pada tabel 7, terdapat Pemohon yang memilih lebih dari satu alasan yang bertolak belakang, seperti disebutkan bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID namun juga menyebutkan alasan bahwa Atasan PPID tidak menanggapi keberatan dapat disimpulkan bahwa Pemohon belum paham dalam menentukan alasan dari pengajuan sengketanya.

Kemudian, Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan Pemohon tidak mendapat tanggapan keberatan dari Atasan PPID Badan Publik mempunyai kecenderungan yang relatif tinggi dibandingkan dengan

Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang lain. Artinya, masih banyak Badan Publik di Provinsi Jawa Barat yang masih belum memahami dan menerapkan kewajiban mereka untuk memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan Pemohon Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Adapun Badan Publik yang paling banyak diajukan sebagai Termohon dalam sengketa informasi pada tahun 2020 adalah Pemerintah Daerah. Tercatat 44 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ditujukan kepada pemerintah Daerah. Adapun Badan Publik yang paling sedikit dijadikan Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi adalah Balai Pemerintah, Lembaga Yudikatif, Non Pemerintah, dan Pemerintah Desa dengan jumlah permohonan masing-masing 1 (satu). Adapun jenis Badan Publik sebagai pihak Termohon diperoleh data berikut:

No	Jenis Badan Publik	Jumlah
1	Badan Pemerintah	2
2	Balai Pemerintah	1
3	BUMD/BUMN	10
4	Lembaga Yudikatif	1
5	Non Pemerintah	1
6	Pemerintah Daerah	44
7	Pemerintah Desa	1
Total		60

Tabel 8. Jenis Badan Publik sebagai Pihak Termohon

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan Badan Publik yang menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Adapun Badan Publik yang menjadi Termohon di atas sebagian besar adalah Badan Publik di lingkup kabupaten/kota dengan sebaran lingkup wilayah sebagai berikut:

No	Lingkup Wilayah	Jumlah
1	Kabupaten Indramayu	1
2	Kabupaten Sumedang	1
3	Kabupaten Bandung	4
4	Kabupaten Bekasi	6
5	Kabupaten Bogor	2
6	Kabupaten Garut	4
7	Kabupaten Indramayu	4
8	Kota Bandung	24
9	Kota Bekasi	1
10	Kota Bogor	3
11	Provinsi Jawa Barat	10
12	Pusat	1
Total		60

Tabel 9. Jenis Badan Publik sebagai Pihak Termohon

Data mengenai jenis Badan Publik dan sebaran lingkup wilayah setidaknya juga menunjukkan, bahwa kepentingan masyarakat mengakses informasi publik berkaitan dengan kebutuhan untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta kebijakan publik yang mempengaruhi langsung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Publik yang berpotensi menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik lebih banyak adalah Badan Publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang saat ini mempunyai sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Hal itu juga bisa dicermati dalam Data mengenai informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada

tahun 2020 berkisar pada 8 jenis kategori informasi publik seperti tergambar dalam tabel 10.

Kode	Kategori Informasi yang dimohonkan	Jumlah
A	Profil Badan Publik, Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan	1
B	Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	45
C	Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik	1
D	Informasi Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak bagi Publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	38
E	Pelayanan Informasi Publik	2
F	Informasi Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Badan Publik	1
G	Perjanjian Pihak Ketiga	5
H	Informasi Perizinan	3
Total		96

Tabel 10. Jenis Informasi yang dimohonkan

Informasi publik yang paling banyak dimohonkan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tahun 2020 adalah Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik. Tercatat ada 45 permohonan terkait hal tersebut.

Sedangkan Informasi publik yang paling sedikit dimohonkan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tahun 2020 adalah Profil Badan Publik, Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan, Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, Informasi Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Badan Publik dengan jumlah permohonan masing-masing 1 (satu) pengajuan.

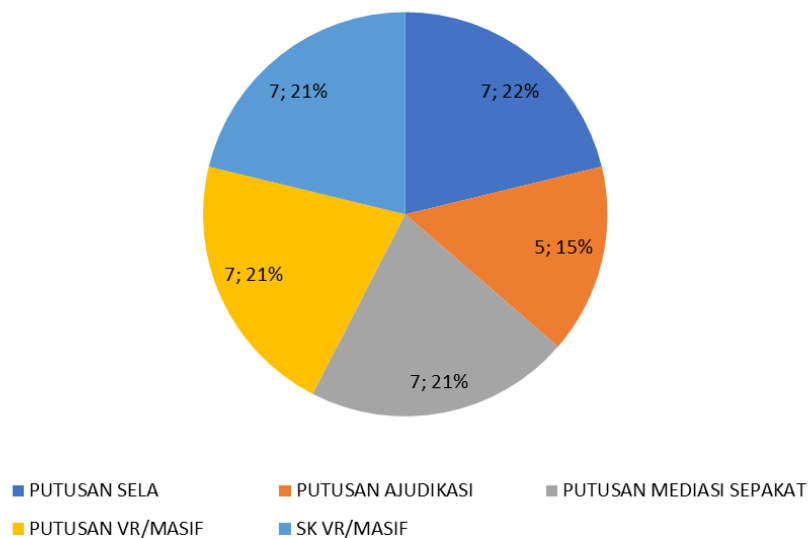
2.2.2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima 60 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Dari 60 Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, tidak semua permohonan tersebut di registrasi. Terdapat satu sengketa yang tidak diregistrasi dan keluar Akta Tidak Registrasi karena Tidak memenuhi/tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan dan terdapat satu sengketa yang masih dalam tahap proses administrasi pemeriksaan kelengkapan dokumen. Sehingga jumlah sengketa yang diregistrasi pada tahun 2020 sebanyak 58 register penyelesaian.

Sepanjang tahun 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang teregistrasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Proses Penyelesaian	Hasil	Jumlah Putusan/SK	Jumlah Register
1	Keluar Putusan	Di Tolak (Kewenangan Relatif)	1 Putusan	1 Register
2	Keluar Putusan	Dikabulkan Sebagian	2 Putusan	2 Register
5	Keluar Putusan	Mediasi Sepakat	7 Putusan	7 Register
7	Keluar Putusan	Di Tolak (Kadaluarsa)	5 Putusan	5 Register
8	Keluar Putusan	Di Tolak (Prematur)	4 Putusan	4 Register
9	Keluar Putusan	Di Tolak (VR/Masif)	1 Putusan	7 Register
10	Keputusan Ketua KI Prov.Jabar	SK Penghentian VR/Masif	1 SK	7 Register
Total			20 Putusan & 1 SK	33 Register

Tabel 11. Hasil Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Sengketa Tahun 2019



Grafik 5. Jenis Putusan yang diselesaikan pada kurun waktu Januari - November Tahun 2020
(Berdasarkan jumlah register)

Berdasarkan diagram Jenis Putusan yang diselesaikan berdasarkan register pada kurun waktu Jan sd Nov 2020 diatas, sebagian putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah putusan yang menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan berdasarkan kepada Keputusan Komisi Informasi Pusat nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sebanyak 21-22% permohonan yang teregistrasi di tahun 2020.

Alasan mengajukan permohonan informasi publik yang sama maupun berbeda lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan. Hal itu sangat disayangkan karena dapat menunjukkan bahwa masih banyak Pemohon yang tidak cukup serius dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Selain data diatas, pada tahun 2020, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga telah menyelesaikan sisa permohonan penyelesaian sengketa pada periode sebelumnya sebanyak 14 Register, karena pada akhir tahun 2019 telah terjadi pergantian Komisioner Komisi Informasi Masa Jabatan Tahun 2015–2019 menjadi Komisioner Komisi Informasi Masa Jabatan Tahun 2019–2023. Dengan data sebagai berikut:

No	Proses Penyelesaian	Hasil	Jumlah Putusan/SK	Jumlah Register
1	Keluar Putusan	Di Tolak (VR/Masif)	5 Putusan	9 Register
2	Keluar Putusan	Dikabulkan Sebagian	3 Putusan	3 Register
5	Keluar Putusan	Dikabulkan Seluruhnya	1 Putusan	1 Register
7	Keluar Putusan	Tidak Dikabulkan Seluruhnya	1 Putusan	1 Register
Total			10 Putusan	14 Register

Tabel 12. Hasil Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Sengketa Tahun 2019

Jika diakumulasi, maka dari proses penyelesaian permohonan Penyelesaian sengketa yang diregister tahun 2019 dan 2020 (sebanyak 58 Permohonan) ada sebanyak 47 register telah diselesaikan di tahun 2020 ini. Sehingga, pencapaian kinerja pencapaian penyelesaian sengketa berdasarkan register pada tahun 2020 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berhasil menyelesaikan 81%.

Pada Tahun 2020 kita mengalami Pandemi akibat wabah covid-19 yang mengakibatkan adanya perubahan rencana terkait penjadwalan persidangan, sehingga mempengaruhi proses pencapaian penyelesaian sengketa.

2.2.3. Penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi Pasca Sengketa

Sesuai dengan UU KIP, maka para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atau Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung. Pada tahun 2020 sebanyak 3 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah diajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan hasil seperti yang dijelaskan pada Tabel 13.

No	Hasil Putusan	Tanggal Keberatan	Tanggal Putusan PTUN
1	Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1045/PTSN-MKA/KI-JBR/IX/2019, tanggal 23 September 2019 ;	Selasa, 15 Okt. 2019	Kamis, 06 Feb. 2020
2	Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1053/PTSN-MK.MA/KI-JBR/ XI/2019 Tanggal 18 November 2019	Selasa, 10 Des. 2019	Selasa, 25 Feb. 2020
3	Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1060/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020	Senin, 06 Apr. 2020	Kamis, 16 Jul. 2020

Tabel 13. Rekapitulasi Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ke PTUN

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2020 terdapat 3 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan ke PTUN Bandung. Sebanyak 2 (dua) dari 3 (tiga) Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah dikuatkan dan berkekuatan hukum tetap.

2.2.4. Peningkatan tata kelola Penyelesaian sengketa Informasi Publik

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diatur melalui Peraturan Komisi Informasi merupakan salah satu regulasi yang dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan teknis pelayanan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Namun tata cara penyelesaian sengketa informasi publik sering kali dipengaruhi beragam kondisi dan situasi yang terjadi. Padahal prosedur dan putusan Komisi Informasi dapat dijadikan keberatan dan diuji di pengadilan. Untuk itu, setiap tahun Komisi Informasi melakukan pelatihan internal bagi asisten dan panitera pengganti untuk meningkatkan standar penyelesaian sengketa informasi publik dan setidaknya dapat diterima dalam sistem peradilan yang berlaku.

Pada tahun 2020, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan lima kali pelatihan internal bagi panitera pengganti dan seluruh asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, karena seluruh asisten turut terlibat dalam penyelesaian sengketa informasi dengan tujuan seluruh staff mengerti tupoksi utama dari Komisi Informasi yang dijelaskan Undang-undang Keterbukaan Informasi. Pelatihan internal tersebut diantaranya :

1. Diskusi terkait dengan Materi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Narasumber Budi Yoga Permana
2. Diskusi terkait dengan Materi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Narasumber Anne Friday Safaria
3. Diskusi terkait dengan agenda pembahasan mengenai keterbukaan informasi publik dan kupas tuntas UU No. 14 Tahun 2008 dengan Narasumber Asep Warlan (Akademisi)
4. Diskusi terkait Sistem Pembuatan Putusan Hasil Persidangan di Ombudsman Perwakilan Jawa Barat dengan Narasumber Ketua Ombudman (Haneda Sri Lastoto, S.H.)
5. Diskusi dengan tema tata cara pembuatan putusan Ajudikasi non Litigasi Komisi Informasi dengan Narasumber Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

6. Diskusi dengan tema membuat Putusan yang ideal berdasarkan Peraturan dengan Narasumber Hakim PTUN Bandung dan tema Mekanisme dan Tupoksi Panitera dalam persidangan dengan Narasumber Panitera PTUN Bandung

Kegiatan pelatihan diharapkan secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sesuai prosedur yang didalam UU KIP dan peraturan penjabarannya.

Lebih jauh lagi, masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan akan digunakan untuk memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan menjadi bahan masukan bagi Komisi Informasi Pusat untuk pertimbangan perbaikan Peraturan Komisi Informasi berdasarkan pengalaman penerapan di lapangan.

2.2.5. Pencapaian Target Penyelesaian sengketa Informasi Publik

Berdasarkan data penyelesaian sengketa informasi publik selama tahun 2019 dan tahun 2020, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah berhasil menyelesaikan 81% dari seluruh permohonan penyelesaian sengketa *on going* yang diajukan pada tahun 2019 – 2020. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masih menyelesaikan 25 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik untuk selanjutnya diteruskan dalam persidangan tahun 2021. Artinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sudah melampaui target untuk menyelesaikan 80% sengketa informasi yang diregsiter.

Pencapaian yang melampaui target adalah putusan Komisi Informasi yang diajukan keberatan ke pengadilan. Pada tahun 2020 hanya 3 Putusan dari seluruh putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan ke PTUN Bandung. Artinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah

melampaui target yang membatasi jumlah putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan maksimal 25% dari seluruh putusan pada tahun berjalan.

Indikator pengajuan keberatan menjadi penting untuk menjadi salah satu faktor melihat kualitas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang telah mengacu pada peraturan perundangan secara lengkap dan mempertimbangkan keterangan dan bukti para pihak secara seksama dan obyektif, sehingga putusan dapat dipahami dan diterima oleh para pihak.

2. 3 Bidang Sosialisasi dan Edukasi

Undang-undang Keterbukaan Informasi sudah hampir sudah berjalan 10 tahun semenjak diberlakukan. Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang ini. Hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan hak asasi yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi publik sebagai wujud partisipasi publik dalam mengembangkan dan mencerdaskan lingkungannya, serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan diskusi reguler pun menjadi salah satu upaya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam mensialisasikan UU KIP, baik dalam konteks sosialisasi eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat beserta tugas pokok dan fungsi maupun sosialisasi lainnya terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks hak dan kewajiban Badan Publik dan masyarakat. Diskusi reguler yang dilakukan dalam bentuk Diskusi Interaktif, Diskusi Publik, FGD dan Seminar.

2.3.1 Kegiatan Sosialisasi

Bidang Sosialisasi dan Edukasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik dan peraturan perundangan yang terkait dengan keterbukaan informasi.

Pada tahun 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan Seminar, *Talkshow* di Radio, dan *Live Streaming Talkshow*, sebagai berikut :

- *Talkshow* Radio

No	Tanggal	<i>Talkshow</i>
1	24 Februari 2020	Talkshow di Radio Pasundan Cianjur dengan tema Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Barat
2	04 Maret 2020	Talkshow di Radio Roda Jari Mas Kab. Pangandaran dengan tema Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Barat
3	14 Maret 2020	Talkshow di Radio Radio Galuh Surya Kencana Tasikmalaya dengan tema Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Barat
4	21 Juli 2020	Talkshow di Ciradio 90.20 FM Kab. Cirebon dengan tema Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Barat Serta Himbauan Pencegahan Covid-19
5	05 Agustus 2020	Talkshow di Radio Bellasalam FM Tasikmalaya dengan tema Keterbukaan Informasi Publik di masa Pandemi Covid-19 serta Pilkada di Jawa Barat
6	27 Agustus 2020	Talkshow di Radio LPPL Purwakarta dengan tema Pelayanan Informasi pada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat
7	03 September 2020	Talkshow di Radio Nasional Buana Suara (NBS) Sukabumi dengan tema Pelayanan Informasi pada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat
8	12 September 2020	Talkshow di Radio Roda Jari Mas Kabupaten Pangandaran dengan tema Keterbukaan dan Pelayanan Informasi pada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat

9	21 September 2020	Talkshow di Kompas TV Jabar dengan tema Pengetahuan Dasar Tentang Komisi Informasi Dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Barat Serta Himbauan Pencegahan Covid-19
10	29 September 2020	Talkshow di Radio Adil Yeli Kabupaten Cirebon dengan tema Pelayanan Informasi pada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat
11	05 Oktober 2020	Talkshow di Radio Pitaloka 88.3 FM Kabupaten Ciamis dengan tema Keterbukaan dan Pelayanan Informasi pada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat
12	07 Oktober 2020	Talkshow di Radio Megaswara Bogor 100.8 FM Kota Bogor dengan tema Pelayanan Informasi pada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat
13	11 Oktober 2020	Talkshow di LPPL Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya dengan tema Keterbukaan dan Pelayanan Informasi pada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat
14	11 Oktober 2020	Talkshow di Radio Galuh 89.5 FM Kota Tasikmalaya dengan tema Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
15	19 Oktober	Talkshow di Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung dengan tema Bruk-Brak/Keterbukaan Informasi Versi Kepemimpinan Perempuan di Jawa Barat
16	22 Oktober 2020	Talkshow di Radio Kijang Kencana FM Indramayu dengan tema Keterbukaan Informasi Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
17	12 November 2020	Talkshow di Radio Pratita Depok dengan tema Menangkal Hoax dengan Memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik
18	19 November 2020	Talkshow di Radio Gaya Bekasi dengan tema Menangkal Hoax dengan Memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik

19	24 November 2020	Talkshow di Radio Aditya Gemilang dengan tema Keterbukaan Informasi Publik Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> dan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
20	25 November 2020	Talkshow di Radio LPPL eRKS FM 106,1 FM Streaming www.ersfm.id Kabupaten Sumedang dengan tema Implementasi Keterbukaan Informasi di Badan Publik

Tabel 14. Live Streaming Talkshow (daring/jarak jauh)

- *Live Streaming Talkshow*

Merujuk pada Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang pada beberapa pointnya menyatakan bahwa untuk memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (*Online*), memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (*Online*) atau media lainnya dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak) maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan Talkshow berbasis virtual tentang pengetahuan dasar mengenai Komisi Informasi dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi di Jawa Barat serta himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

No	Tanggal	<i>Talkshow</i>
1	13 Mei 2020	Live streaming talkshow dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Situasi Pandemi Covid 19” di Radio LPPL Kuningan FM
2	22 Mei 2020	Live streaming talkshow dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Situasi Pandemi Covid 19” di Radio Medina 105.3 FM Garut

3	28 Mei 2020	Live streaming talkshow dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Situasi Pandemi Covid 19” di Radio LPPL Purwakarta
4	02 Juni 2020	Live streaming talkshow dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Situasi Pandemi Covid 19” di Radio LPPL Bogor (Teman 95.3 FM)
5	04 Juni 2020	Live streaming talkshow dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Situasi Pandemi Covid 19” di Radio Kandaga
6	08 Juni 2020	Live streaming talkshow dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Situasi Pandemi Covid 19” di Radio LPPL Tasikmalaya Purbasora 105.7 FM

Tabel 15. Live Streaming Talkshow (daring/jarak jauh)

- Seminar (Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik)

Bidang Sosialisasi dan Edukasi telah melaksanakan kegiatan seminar yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 yang dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong semua elemen masyarakat agar dapat memahami keterbukaan informasi dan kedudukannya sebagai pemohom informasi yang diamanahkan oleh UU KIP serta mendorong agar masyarakat berperan aktif untuk mengawal penerapan keterbukaan informasi publik tersebut secara luas. Narasumber kegiatan ini adalah:

1. Ijang Faisal, S.Ag., M.Si (Ketua Komisi Informasi Jawa Barat)
2. Dadan Saputra S.Ag., M.Si (Komisioner bidang Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Jawa Barat)
3. Dr. (Cd) Resty Ismawati. S.Pd., M.M. (Akademisi)
4. Yana (Perwakilan dari Masyarakat)

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan keterbukaan informasi publik serta menginisiasi pembentukan komisi informasi di kabupaten/kota.

Selain kegiatan sosialisasi yang diseleenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kegiatan sosialisasi lainnya dilakukan dengan menghadiri undangan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik maupun kelompok masyarakat. Pada tahun 2020 Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menjadi narasumber dan mengikuti kegiatan terkait sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	<i>Talkshow</i>
1	30 Januari 2020	Undangan menjadi Narasumber di Kabupaten Bekasi pada Kegiatan Rakor Pelayanan Informasi Tingkat Kabupaten Bekasi Tahap II pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat daerah Kabupaten Bekasi
2	6 Februari 2020	Undangan menjadi Narasumber di Kabupaten Bandung pada Kegiatan HIPMI sekolah Tinggi Hukum Bandung Masuk desa Jilid V di Desa Tarumajaya Kab Bandung
3	25 – 26 Februari 2020	Undangan menjadi Narasumber ke Kabupaten Cianjur dengan agenda Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Le Eminence Puncak Hotel Convention&Resort
4	16 Juni 2020	Menjadi narasumber dalam acara webinar dengan tema “Mendalami Informasi Publik” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat
5	23 September 2020	Menghadiri webinar yang diselenggarakan oleh KPU Tasikmalaya dengan tema “Penguatan Partisipasi Politik KPU Tasikmalaya”

6	30 September 2020	Undangan menjadi narasumber yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam agenda pembinaan PPID di Kota Bekasi
7	30 September 2020	Undangan Menjadi Narasumber yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan tema penyelenggarakan Peningkatan Optimalisasi peran dan Fungsi
8	1 Oktober 2020	Undangan menjadi narasumber yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Garut dengan tema Rapat kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2020
9	7 Oktober 2020	Undangan menjadi narasumber yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bandung dengan tema kegiatan/Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia
10	14 Oktober 2020	Undangan Menjadi narasumber yang diselenggarakan POLDA Jabar di Hotel Shakti Bandung dengan Tema Bersama kita Tingkatkan Promoter Bidang Kehumasan Menuju POLRI yang Unggul Indonesia Maju
11	18-19 Oktober 2020	Undangan Menjadi Narasumber yang diselenggarakan PPID Kabupaten majalengka dengan Tema Diseminasi Untuk Peningkatan Keterbukaan Informasi .
12	26 Oktober 2020	Undangan Menjadi Narasumber yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Subang pada kegiatan Rapat Koordinasi PPID Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik Disaat Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit

Tabel 16. Kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh Pihak lain

Komisi Informasi melakukan sosialisasi dalam 12 kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak lain dari berbagai macam peserta.

2.3.2 Pencapaian Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi telah terlaksana dengan melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan kerjasama tersebut, maka pada tahun 2020 telah diselenggarakan setidaknya 1 kali kegiatan seminar dan 23 *talkshow* baik secara langsung dengan mendatangi radio atau secara *live streaming*. Sebagian besar kegiatan sosialisasi pada tahun ini terfokus pada masyarakat, berbeda dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang masih terpusat pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat. Artinya kegiatan *talkshow* mulai menjangkau kelompok-kelompok masyarakat.

Selain yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa barat, kegiatan sosialisasi lainnya dilakukan dengan menghadiri undangan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik maupun kelompok masyarakat telah dilaksanakan sebanyak 12 kali kegiatan sosialisasi. Sedikit inisiatif dari oleh Badan Publik maupun kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya, Kegiatan diskusi belum menjangkau kelompok-kelompok kepentingan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Langkah-langkah sosialisasi dan edukasi berguna untuk mempengaruhi dan mendorong masyarakat dan Badan Publik dalam implemmtasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu capaian kegiatan berupa Talkshow/Live streaming, Seminar, Webinar, Press reelease media cetak dan *online* yang telah dilaksanakan oleh bidang sosialisasi dan edukasi komisi informasi jawa barat adalah sebagai berikut:

1. *Talkshow* dan *Live Streaming*

- Terwujudnya sinergi antara KI Provinsi dengan insan media dalam mendorong keterbukaan informasi di provinsi Jawa Barat.

- Pemahaman yang baik mengenai Kedudukan komisi Informasi dan Tugas, pokok serta fungsinya.
- Adanya kesadaran bersama untuk mengkampanyekan keterbukaan Informasi di provinsi Jawa Barat.
- Kupas tuntas Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 kepada masyarakat maupun Badan Publik.
- Pemahaman yang baik mengenai Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi provinsi jawa barat.
- Mengkampanyekan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik pada masa pandemi Covid-19 dan masa adaptasi kebiasaan baru di Provinsi jawa barat.
- Pentingnya menangkal hoax dengan memanfaatkan keterbukaan informasi publik pada masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru di provinsi jawa barat.

2. Seminar

- Mendorong masyarakat untuk memahami keterbukaan informasi dan kedudukannya sebagai pemohon informasi yang diamanahkan oleh UU KIP
- Mendorong masyarakat berperan aktif mengawal penerapan keterbukaan informasi publik tersebut secara luas

2. 4 Bidang Advokasi dan MONEV

Bidang Advokasi dan Monev mempunyai kegiatan untuk mendorong peningkatan penerapan keterbukaan informasi oleh Badan Publik. Pada tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Advokasi dan Monev adalah melakukan kegiatan webinar dan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi.

2.4.1 Kegiatan Webinar

Upaya mengadvokasi dan mendiseminasikan nilai-nilai Keterbukaan Informasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepedulian terhadap isu-isu Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mendorong peserta memiliki action plan yang jelas dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif di daerahnya masing-masing.

Dalam rangka mengoptimalkan pemahaman Badan Publik juga publik terhadap UU 14 2008 serta peraturan perundangan lainnya tentang keterbukaan informasi publik maka divisi advokasi dan Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan advokasi dan diseminasi ini antara lain melalui berbagai kegiatan webinar sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber
1	07 Mei 2020	Webinar dengan tema Fenomena Keterbukaan Informasi di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh KI Jabar dan UMB	• Gede Narayana • dr. Corona Rintawan, SpEM. • Prof. DR. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. • Makroen Sanjaya

2	15 Mei 2020	Webinar dengan tema Komunikasi dan Informasi Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KI Jabar, Disdik Jabar dan UMB	• Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. • DR. Ir. Dewi Sartrika, M.Si. • DR. Suwandi Sumartias
3	16 Mei 2020	Webinar dengan tema Ketika Perempuan Merebut Informasi yang diselenggarakan oleh KI Jabar, UNINUS dan Fatayat NU Jabar	• KH. Hasan Nuri Hidayatullah • Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.Si. • DR. Anne Friday S., M.Si. • Hirni Kifa Hazefa, S.Pd., M.Ikom.CEC.
4	18 Mei 2020	Webinar dengan tema Menakar Keterbukaan Informasi dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh KI Jabar, WJ today, Berita Indonesia link, NJE	• Dr. Tb. Ace Hasan Sadzili, M.Si. • Dr. Bucky Wikagoe • Ade Sudrajat Dipl., Ing. • Ir.Entang sastra Atmaja • DR.Fery Kurnia Rizkiansyah, M.Si. • DR.Jaka Badranaya, M.Si.
5	19 Mei 2020	Rakor dengan tema Keterbukaan Informasi Badan Publik saat Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh KI Jabar, Diskominfo Jabar, PPID Jabar	• Sekda Provinsi Jawa Barat • Ijang Faisal
6	21 Mei 2020	Webinar dengan tema Keterbukaan Informasi Publik Ruh Utama dalam Memenej Penanganan Pandemi Covid 19 yang diselenggarakan oleh KI Jabar, Pikiran Rakyat, Utama UNPAD, Universitas Widyatama	• Prof.Muradi, S.S., M.Si.,M.Sc., P.Hd • Dr. Ineu Purwadedi, M.Si. Heru Suandaru S.Si., M.Si. • Drs. H. Daud Ahmad

Tabel 17. Webinar yang diadakan oleh Komisi Infomasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Selain kegiatan *webinar* yang diseleenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kegiatan *webinar* lainnya dilakukan dengan menghadiri undangan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik maupun kelompok masyarakat. Pada tahun 2020 Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menjadi narasumber dan mengikuti kegiatan terkait *webinar* dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	26 Agustus 2020	Webinar “Ngaji Demokrasi” yang digelar KPU Kabupaten Kuningan
2	19 September 2020	“Transfaransi Kelembagaan PPK se Kabupaten Bandung” yang digelar KPU Kabupaten Bandung
3	22 September 2020	Webinar Pendidikan Politik Bagi Perempuan yang diselenggarakan KPU Kota Tasikmalaya
4	20 September 2020	Webinar “Transfaransi Pilkada Serentak 2020” Badami Korp HMI Wati Kabupaten Bandung
5	19 Oktober 2020	Diseminasi Peningkatan kapasitas PPID se Kabupaten Majalengka
6	19 November 2020	Webinar Literasi Media Fikom UPI Bandung dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik Generasi Milenial”

Tabel 18. Webinar yang dihadiri oleh Komisi Informasi sebagai Narasumber

2.4.2 Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Penerapan Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengawal penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Badan Publik Jawa Barat.

Walaupun Kondisi darurat kesehatan akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah mempengaruhi pelayanan informasi publik di seluruh Badan Publik di tahun ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tetap melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi dengan menggunakan metodologi baru yaitu mengoptimalkan media daring baik saat sosialisasi pelaksanaan Monev sampai tahap akhir penganugrahan pemeringkatan badan publik.

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 5 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan kewajiban menyusun laporan pelayanan informasi publik.

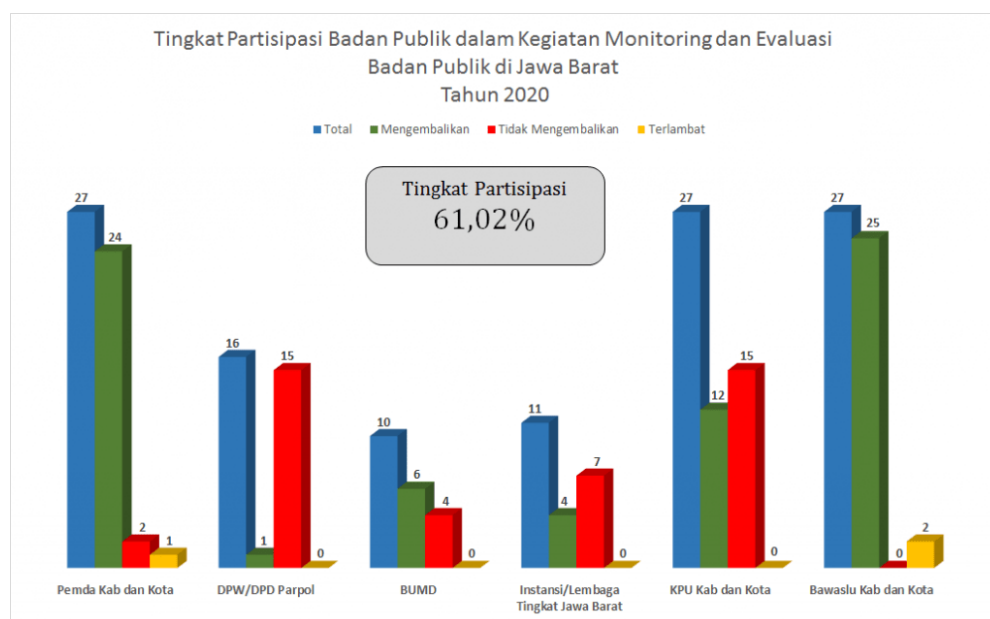
Selain lima kewajiban di atas, Khusus untuk Badan Publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan Monev penerapan keterbukaan informasi publik pada pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19* di Jawa Barat. Berbeda dengan Badan Publik selain Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, yang hanya fokus pada kewajiban Badan Publik mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala juga informasi serta merta.

Pada tahun 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi ke 6 (enam) jenis Badan Publik, yaitu:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat
3. Lembaga/Instansi Provinsi Jawa Barat
4. KPU Kabupaten/kota di Jawa Barat
5. Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Barat
6. Partai Politik Provinsi Jawa Barat

Melalui Monev 2020 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran berikut: *Pertama*, penerapan UU KIP terkait informasi penanganan *Covid-19* pada Badan Publik di Jawa Barat khususnya Pemerintah Daerah kabupaten/kota. *Kedua*, memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan penanganan *Covid-19* ini. *Ketiga*, memenuhi hak atas informasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan *Covid-19*. *Keempat*, mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran *Covid-19*.

Sampai batas akhir pengembalian kuesioner Monev, tercatat dari jumlah 135 Badan Publik hanya 73 (61,02%) Badan Publik se Jabar yang mengembalikan kuesioner (SAQ) Monev Penerapan Keterbukaan Informasi secara tepat waktu. 4 badan publik terlambat saat mengembalikan SAQ dan 62 Badan publik lainnya tidak mengembalikan SAQ. Diantara 62 Badan Publik tersebut, beberapa diantaranya 3 Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 14 KPU kabupaten/kota, 2 Bawaslu kabupaten/kota, 3 BUMD, sisanya lembaga vertikal tingkat Jawa Barat dan Partai Politik.



Grafik 6. Tingkat Partisipasi Publik dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020

Tim Penilai Independent Monev beserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan visitasi ke beberapa Badan Publik peserta Monev yang memenuhi kualifikasi untuk divisitasi. Berdasarkan hasil visitasi Tim Penilai Independent dan para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sebagian besar Badan Publik belum maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan informasi publik. Anggaran yang terpangkas hingga adanya kebijakan *Work From Home* selama masa pandemi *Covid-19* menjadi keluhan utama hampir semua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang divisitasi. Di samping masalah anggaran yang terpangkas untuk penanganan *Covid-19*, ditemukan fakta jika masih ada PPID yang belum memahami tupoksinya juga warga masyarakat yang tidak paham soal SOP permintaan informasi publik.

Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa PPID telah menunjukkan keseriusan dan kualitas dalam pengelolaan maupun layanan informasi publik, kendati masih dibayang-bayangi oleh pandemi *Covid-19*. Hal tersebut terlihat dari adanya inovasi juga strategi yang telah dilakukan PPID tsb seperti *smart city*

berbasis android, pembentukan PPID sampai tingkat desa hingga tersedianya sistem data atau informasi terkait *Covid-19* secara *real time*.

Pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 bertempat di kantor KI Provinsi Jabar, Tim Penilai Independent yang terdiri dari

- Budi Yoga Permana S.IP., selaku Ketua
- Yudaningsih, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris didampingi anggota Tim Penilai
- DR.Dedy Djamaludin Malik, M.Si.
- Dra.Hj.Lovita Andriana Rosa M.Si;
- Ahmad Taufiqurrahman S.AB., M.AB.

memutuskan bahwa hasil akhir penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai
		15%	5%	5%	20%	25%	30%	
1	Kabupaten Bandung	92.63%	88.89%	100%	78.75%	83.75%	80.00%	84.03%
2	Kota Bekasi	76.84%	95.56%	100%	87.50%	61.25%	77.33%	77.32%
3	Kota Bandung	88.42%	60.00%	100%	72.50%	72.00%	68.00%	74.16%
4	Kota Bogor	67.37%	71.11%	93.33%	66.25%	50.00%	65.33%	63.68%
5	Kabupaten Bogor	61.05%	82.22%	100%	87.50%	30.00%	54.67%	59.67%
6	Kabupaten Majalengka	56.84%	82.22%	100%	83.75%	25.00%	57.33%	57.84%
7	Kabupaten Karawang	51.58%	86.67%	86.67%	62.50%	45.00%	57.33%	57.35%
8	Kota Tasikmalaya	74.74%	73.33%	93.33%	60.00%	20.00%	62.67%	55.34%
9	Kota Cimahi	67.37%	82.22%	90.00%	53.75%	20.00%	69.33%	55.27%
10	Kota Depok	67.37%	75.56%	73.33%	70.00%	23.75%	50.67%	52.69%
11	Kabupaten Ciamis	47.37%	20.00%	93.33%	57.50%	20.00%	70.67%	50.47%
12	Kota Cirebon	52.63%	62.22%	73.33%	52.50%	26.25%	58.67%	49.34%
13	Kabupaten Sukabumi	36.84%	20.00%	73.33%	27.50%	20.00%	61.33%	39.09%
14	Kabupaten Indramayu	47.37%	20.00%	56.67%	42.50%	20.00%	48.00%	38.84%
15	Kabupaten Subang	44.21%	80.00%	80.00%	36.25%	20.00%	37.33%	38.08%
16	Kabupaten Purwakarta	43.16%	20.00%	60.00%	32.50%	20.00%	45.33%	35.57%
17	Kabupaten Tasikmalaya	47.37%	37.78%	46.67%	22.50%	20.00%	48.00%	35.23%
18	Kabupaten Pangandaran	47.37%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	50.67%	33.31%
19	Kabupaten Sumedang	40.00%	73.33%	80.00%	40.00%	20.00%	20.00%	32.67%
20	Kab. Bekasi	31.58%	73.33%	20.00%	20.00%	20.00%	45.33%	32.00%
21	Kabupaten Cirebon	43.16%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	48.00%	31.87%
22	Kabupaten Cianjur	40.00%	20.00%	30.00%	36.25%	20.00%	20.00%	26.75%
23	Kabupaten Bandung Barat	40.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	49.33%	22.80%
24	Kota Banjar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Tabel 19. Hasil Akhir Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat

Dari Rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih tingkat informatif adalah

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1	Kabupaten Bandung	84,03 %
2	Kota Bekasi	77,32 %
3	Kota Bandung	74,16 %

Tabel 20. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih tingkat informatif

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih tingkat informatif dan menuju informatif

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1	Kota Bogor	63.68%
2	Kabupaten Bogor	59.67%
3	Kabupaten Majalengka	57.84%
4	Kabupaten Karawang	57.35%
5	Kota Tasikmalaya	55.34%
6	Kota Cimahi	55.27%

Tabel 21. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih tingkat menuju informatif

Disamping pemeringkatan tersebut, Tim Penilai Independent juga memutuskan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berhak meraih juara per kategori. Adapun kategori yang dimaksud beserta akumulasi nilai masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Serta Merta
1	Kabupaten Bandung	92.63%		100%		83.75%	80.00%
2	Kota Bekasi		95.56%	100%	87.50%		
3	Kota Bandung			100%			
4	Kabupaten Bogor			100%	87.50%		
5	Kabupaten Majalengka			100%			

Tabel 22. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih juara perkategori

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai Independent maka pemeringkatan untuk BUMD adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Nilai Akhir
1	PT. BJB	76.67%
2	PT. BIJB	65.56%
3	PT. Jamkrida	60.00%
4	PT. Jaswita	54.44%
5	PT. Jasa Sarana	33.33%
6	PT. Tirta Gemah Ripah	30.00%

Tabel 23. Hasil Pemeringkatan BUMD

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai Independent, tidak ada satupun BUMD yang meraih peringkat informatif. Terdapat tiga BUMD yang meraih peringkat menuju informatif yaitu PT BJB, PT BIJB dan PT Jamkrida. Satu BUMD yang meraih peringkat cukup informatif yaitu PT Jaswita. Adapun PT Jasa Sarana dan PT Tirta Gemah Ripah meraih peringkat kurang informatif.

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai Independent maka pemeringkatan untuk instansi tingkat Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Nilai Akhir
1	Bawaslu Provinsi Jabar	76.67%
2	PMI Provinsi Jabar	65.56%
3	KPU Provinsi Jabar	60.00%
4	BNN Provinsi Jabar	54.44%

Tabel 24. Hasil Pemeringkatan Instansi Tingkat Jawa Barat

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai Independent, hanya satu lembaga vertikal tingkat Jabar yang meraih peringkat informatif yaitu Bawaslu Provinsi Jabar. Terdapat tiga lembaga yang meraih peringkat menuju informatif yaitu: PMI Jabar, KPU Provinsi Jabar dan BNN Provinsi Jabar. Terdapat 7 lembaga tingkat Jabar yang meraih predikat tidak informatif karena tidak berpartisipasi aktif mengembalikan SAQ.

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai Independent maka pemeringkatan untuk KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Nilai Akhir	Peringkat
1	KPU Kabupaten Bandung	90.48%	Informatif
2	KPU Kabupaten Cirebon	90.48%	Informatif
3	KPU Kota Bogor	88.57%	Informatif
4	KPU Kota Tasikmalaya	84.76%	Informatif
5	KPU Kota Bandung	84.76%	Informatif
6	KPU Kabupaten Majalengka	84.76%	Informatif

7	KPU Kabupaten Kuningan	83.81%	Informatif
8	KPU Kota Bekasi	76.19%	Menuju Informatif
9	KPU Kota Cirebon	60.95%	Menuju Informatif
10	KPU Kota Sukabumi	42.86%	Cukup Informatif
11	KPU Kota Cimahi	41.90%	Cukup Informatif
12	KPU Kabupaten Subang	35.24%	Kurang Informatif
13	KPU Kabupaten Purwakarta	24.76%	Kurang Informatif

Tabel 25. Hasil Pemeringkatan KPU kabupaten/kota

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai Independent maka pemeringkatan untuk Bawaslu Kab/Kota adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Nilai Akhir	Peringkat
1	Bawaslu Kab Ciamis	80.00%	Informatif
2	Bawaslu Kota Cirebon	70.48%	Menuju Informatif
3	Bawaslu Kab Majalengka	68.57%	Menuju Informatif
4	Bawaslu Kab Pangandaran	68.57%	Menuju Informatif
5	Bawaslu Kab Kuningan	68.57%	Menuju Informatif
6	Bawaslu Kota Tasikmalaya	67.62%	Menuju Informatif
7	Bawaslu Kota Bandung	66.67%	Menuju Informatif
8	Bawaslu Kota Cimahi	63.81%	Menuju Informatif
9	Bawaslu Kab Bandung	60.95%	Menuju Informatif
10	Bawaslu Kab Bogor	58.10%	Cukup Informatif
11	Bawaslu Kab Garut	56.19%	Cukup Informatif
12	Bawaslu Kota Depok	55.24%	Cukup Informatif
13	Bawaslu Kota Bogor	53.33%	Cukup Informatif
14	Bawaslu Kab Subang	44.76%	Cukup Informatif
15	Bawaslu Kab Indramayu	41.90%	Cukup Informatif
16	Bawaslu Kota Banjar	40.00%	Cukup Informatif
17	Bawaslu Kota Bekasi	40.00%	Cukup Informatif
18	Bawaslu Kab Sumedang	37.14%	Kurang Informatif
19	Bawaslu Kab Cirebon	34.29%	Kurang Informatif
20	Bawaslu Kab Bandung Barat	34.29%	Kurang Informatif
21	Bawaslu Kab Bekasi	33.33%	Kurang Informatif
22	Bawaslu Kab Cianjur	33.33%	Kurang Informatif
23	Bawaslu Kab Tasikmalaya	30.48%	Kurang Informatif
24	Bawaslu Kab Sukabumi	25.71%	Kurang Informatif
25	Bawaslu Kota Sukabumi	23.81%	Kurang Informatif

Tabel 26. Hasil Pemeringkatan Bawaslu kabupaten/kota

Diantara 16 Partai Politik se Jawa Barat, hanya satu yang menyerahkan kembali SAQ yaitu DPW PKS Jabar, dengan akumulasi nilai akhir sebanyak 88,57 %. Alhasil, DPW PKS Jabar meraih peringkat informatif di antara Partai Politik yang ada di Jawa Barat. Adapun 15 Partai politik lainnya meraih peringkat tidak informatif karena tidak menyerahkan kembali SAQ sampai batas akhir pengembalian SAQ.

2.4.3 Pencapaian Kegiatan Advokasi dan Monev

Melalui Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP terkait informasi penanganan *Covid-19* pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi, monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan penanganan *Covid-19* ini untuk memenuhi hak atas informasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan *Covid-19* sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran *Covid-19*.

Sejak Januari 2020 sampai dengan november 2020, Bidang Advokasi dan Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa pencapaian target antara lain bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai stake holder untuk bersama-sama mendorong keterbukaan informasi publik. Sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab tentang webinar juga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020.

Berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh tim verifikator Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan visitasi yang dilakukan oleh tim penilai independen, komisioner, dan asisten. Maka, terdapat beberapa kendala baik yang dihadapi oleh publik ataupun badan publik, tentang pemahaman mereka terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik.

Tercatat beberapa rekomendasi usai visitasi untuk PPID badan publik. Pertama, koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu lebih ditingkatkan agar layanan informasi kepada masyarakat lebih optimal. Kedua, website layanan informasi hendaknya terkoneksi dengan PPID pembantu agar informasi berkala dan lainnya selalu tersedia dan diupdate di website PPID utama. Ketiga, perlu adanya kesungguhan PPID utama untuk melakukan uji konsekuensi juga menetapkan Daftar Informasi Publik. Keempat, sosialisasi kepada pemohon informasi harus lebih ditingkatkan agar ada persepsi yang sama terhadap prosedur permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang menaungi. Kelima, Pemerintah daerah pun pimpinan badan publik belum berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan tugas PPID baik dalam bentuk suport anggaran maupun SDM yang mumpuni.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam mengawal keterbukaan informasi di Jawa Barat. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk komitmen Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang diberikan fungsi melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya untuk terus mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan

1. Bidang Kelembagaan

1.1 Kunjungan Kelembagaan



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Pusat



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Kota Cirebon

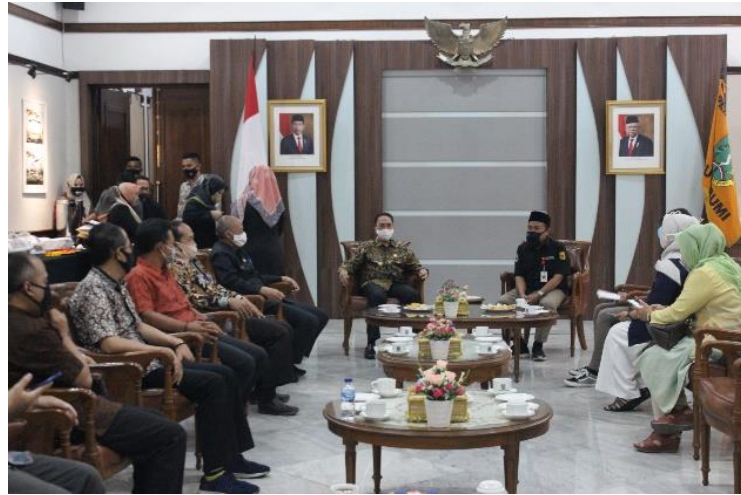


Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Pemerintah Daerah Sukabumi



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Pemerintah Daerah Cianjur



Foto. MOU Komisi Informasi Jawa barat dengan *International Woman University* (IWU)

1.2 Kegiatan Kerjasama



Foto. MOU Komisi Informasi Jawa barat dengan Fatayat NU Jawa barat



Foto. MOU Komisi Informasi Jawa barat dengan BAWASLU Jawa barat



Foto. Audensi Keterbukaan Informasi Publik dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

1.3 Peningkatan Kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Audensi Keterbukaan Informasi Publik dengan Pengadilan Tata Usaha Negara



Foto. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

2.1 Sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Persidangan MATA Vs Setwan Garut



Foto. Persidangan MATA vs Sekertariat DPRD Kab.Garut



Foto. Persidangan LSM KOREK vs Pemkot Bandung Unit kerja Kec. Batununggal

2.2 Sidang di luar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Sidang Ajudikasi non Litigasi Fatmah untuk rosid vs ATR-BPN Karawang



Foto. Mediasi Fatmah untuk rosid vs ATR-BPN Karawang

2.3 Pemeriksaan Setempat



Foto. Pemeriksaan Setempat Dinas Pendidikan



Foto. Pemeriksaan Setempat Kec.Sawangan Depok

3. Bidang Sosialisasi dan Edukasi

3.1 *Talkshow Radio*



Foto: Talkshow di Radio LPPL Purwakarta



Foto: Talkshow di Radio Megaswara Bogor



Foto: Talkshow di Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung



Foto: Talkshow di Radio Pasundan Cianjur



Foto: Talkshow di Radio Roda Jari Mas Pangandaran



Foto: Talkshow di Radio Galuh Tasikmalaya



Foto: Talkshow di Ciradio Kabupaten Cirebon



Foto: Talkshow di Radio Bellasalam FM Tasikmalaya



Foto: Talkshow di Radio NBS Sukabumi



Foto: Talkshow di Radio Adil Yeli Kabupaten Cirebon



Foto. Talkshow di Radio Pitaloka Kab. Ciamis



Foto. Talkshow di LPPL Radiio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya



Foto: Talkshow di Radio Galuh Kota Tasikmalaya



Foto: Talkshow di Radio Kijang Kencana FM Indramayu



Foto: Talkshow di Radio Gaya Bekasi



Foto: Talkshow di Radio Aditya Gemilang



Foto: Talkshow di Radio Reka Kharisma Swara (Reks FM) Garut



Foto: Talkshow di Radio LPPL eRKS FM



Foto: Talkshow di Radio RJM Kab. Pangandaran

3.2 Seminar Keterbukaan Informasi Publik



Foto: Seminar Keterbukaan Informasi Publik

4. Bidang Advokasi dan Monev

4.1 Verifikasi Lapangan Monitoring dan Evaluasi



Foto: Verifikasi Lapangan PT Jaswita



Foto: Verifikasi lapangan PT Tirta Gemah Ripah



Foto: Verivikasi Lapangan PT BIJB Majalengka



Foto: Verivikasi Lapangan Diskominfo Kabupaten Bogor



Foto: Verivikasi Lapangan Diskominfo Kabupaten Majalengka



Foto: Verivikasi Lapangan Diskominfo Kota Cimahi



Foto: Verivikasi Lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang



Foto: Verivikasi Lapangan Diskominfo Kota Bekasi



Foto: Verivikasi Lapangan Diskominfo Kabupaten Karawang



Foto: Verivikasi Lapangan Diskominfo Kabupaten Bandung



Foto: Verivikasi Lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung



Foto: Verivikasi Lapangan KPU Provinsi Jawa Barat



Foto: Verivikasi Lapangan Diskominfo Kota Bandung



Foto: Verivikasi Lapangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat



Foto: Verivikasi Lapangan Diskominfo Kota Depok

4.2 Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi



Foto: Sosialisasi Monev 2020



Foto: Sosialisasi Monev 2020

4.3 Rapat dengan Tim Penilai



Foto: Rapat Tim Penilai Monev 2020



Foto: Rapat Tim Penilai Monev 2020

4.4. *Focus Group Discussion* (FGD) RUU Perlindungan Data Pribadi di Pikiran Rakyat



Foto: Peserta FGD RUU Perlindungan Data Pribadi



Foto: Narasumber FGD RUU Perlindungan Data Pribadi

LAMPIRAN

Bidang Sosialisasi dan Edukasi

1. Realese dengan viewer terbanyak

No	Media	Viewers	Keterangan
1.	Timesindonesia.co.id	32.08 K	 The screenshot shows a news article from Times Indonesia. The headline is "Komisi Informasi Jabar Gelar Webinar Fenomena KIP di Tengah Pandemi Covid-19". Below the headline, it says "Jumat, 08 Mei 2020 - 18:37 32.08k". There are social media sharing icons for Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, and a plus sign. Below the text is a video thumbnail showing a man in a batik shirt speaking at a podium with the Indonesian flag in the background. The caption below the video reads: "Ketua KIP Jabar Ijeng Faisal saat webinar 'Fenomena Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tengah Pandemi Covid-19'".
2.	Timesindonesia.co.id	24.99 K	 The screenshot shows another news article from Times Indonesia. The headline is "Komisi Informasi Sebut Masyarakat Butuh Transparansi UU Cipta Kerja". Below the headline, it says "Senin, 12 Oktober 2020 - 21:00 24.99k". There are social media sharing icons. Below the text is a photo of a group of people standing behind a table. The caption below the photo reads: "Jajaran Komisi Informasi (KI) Jawa Barat. (FOTO: Dok KI Jabar for TIMES Indonesia)". At the bottom, it says "Pewarta: Iwa Ahmad Sugriwa Editor: Desay Mayasari" and "TIMESINDONESIA, BANDUNG – Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijeng Faisal, mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan transparansi dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan Faisal dalam sebuah acara yang digelar oleh Komisi Informasi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Senin (12/10/2020)."

6.	Timesindonesia.co.id	19.11 K	TIMES INDONESIA POLITIK KI Jabar Minta Badan Publik yang Tak Kembalikan Kuesioner Monev 2020 untuk Terbuka Jumat, 02 Oktober 2020 - 13:35 19.11k Jakarta Jajaran Komisiner Komisi Informasi (KI) Jawa Barat. (FOTO: Dok KI Jabar for TIMES Indonesia) Pewarta: Fazar Kurniawan (MG-272) Editor: Iwa Sugriwa TIMESINDONESIA, BANDUNG – Tercatat 68 badan publik se-Jawa Barat
7.	Timesindonesia.co.id	15.68 K	TIMES INDONESIA PERISTIWA DAERAH Ridwan Kamil Akan Berikan Anugerah Keterbukaan Informasi Jawa Barat Jumat, 20 November 2020 - 23:42 15.68k Jakarta Ketua KIP Jabar Ijeng Faisal saat monev visitasi badan publik, di Sekretariat KI Jabar, Bandung, Jumat (20/11/20). (FOTO: KI Jabar for TIMES Indonesia) Pewarta: Iwa Ahmad Sugriwa Editor: Iwa Sugriwa TIMESINDONESIA, BANDUNG – Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) akan Plaza Korea Kimchi Samwon Jaun Bawang Fresh [200g] -10% blibli

2. Realese Komisi Informasi Jawa Barat di Media Online dan Cetak Tahun 2020

No	Tanggal Terbit	Media	Link	Judul Berita	Views
1	18 Januari 2020	Online (TribunJabar.id)	https://jabar.tribunnews.com/2020/01/18/komisi-informasi-ki-jabar-memulai-proses-penyelesaian-sengketa-informasi-publik	Komisi Informasi (KI) Jabar Memulai Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
2	20 Januari 2020	Online (SeputarNews.Com)	http://www.seputarnews.com/komisi-informasi-jabar-dorong-ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-segera-diundangkan/	Komisi Informasi Jabar dorong RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Segera Diundangkan	6
3	20 Januari 2020	Cetak (InilahKoran) Hal. 12		KI Jabar Segera Tuntaskan 14 Sengketa Informasi	13
4	20 Januari 2020	Online (JoernalInakor.com)	https://joernalinakor.com/komisi-informasi-ki-provinsi-jawa-barat-dorong-ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-segera-diundangkan/	Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Segera Diundangkan	
5	20 Januari 2020	Online (Facebook)	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=178096653566135&id=100040974054054	Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Segera Diundangkan	
6	20 Januari 2020	Online (JABAR ONLINE.COM)	https://jabaronline.com/regional/bandung/komisi-informasi-ki-provinsi-jawa-barat-dorong-ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-segera-diundangkan/	Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Untuk Segera Diundangkan	35
7	20 Januari 2020	Online (Indonesia Express Com)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/01/20/komisi-informasi-ki-provinsi-jawa-barat-dorong-ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-segera-diundangkan/	Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Untuk Segera Diundangkan	98

8	20 Januari 2020	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/01/20/komisi-informasi-jabar-apresiasi-ruu-perlindungan-data-pribadi-kedalam-prolegnas-dpr-ri-tahun-2020/	Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Untuk Segera Diundangkan	25
9	22 Januari 2020	Online (prabunews.com)	https://www.prabunews.com/2020/01/20/komisi-informasi-ki-provinsi-jawa-barat-dorong-ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-segera-diundangkan/	Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Untuk Segera Diundangkan	
10	22 Januari 2020	Online (TribunJabar.id)	https://jabar.tribunnews.com/2020/01/22/sidang-penyelesaian-sengketa-informasi-publik-di-komisi-informasi-provinsi-jawa-barat	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	
11	23 Januari 2020	Online (Indonesia Express Com)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/01/22/sidang-penyelesaian-sengketa-informasi-publik-di-komisi-informasi-provinsi-jawa-barat-kl-jabar-meminta-badan-publik-agar-terbuka/	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, KI Jabar minta Badan Publik Terbuka	92
12	23 Januari 2020	Online (fixindonesia.com)	https://www.fixindonesia.com/8-register-sengketa-informasi-publik-sampai-pada-tahap-keputusan-final/	8 Register Sengketa Informasi Publik Sampai Pada Tahap Keputusan Final	
13	23 Januari 2020	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/01/23/komisi-informasi-jawa-barat-gelar-sidang-pertama/	Komisi Informasi Jawa Barat Gelar Sidang Pertama	
14	24 Januari 2020	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/01/23/sidang-perdana-penyelesaian-sengketa-kip-jabar-minta-badan-publik-agar-terbuka/	Sidang Perdana Penyelesaian Sengketa, KIP Jabar Minta Badan Publik Agar Terbuka	93
15	24 Januari 2020	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/uu-kip-secara-spesifik-mengatur-ancaman-pidana-informasi/	UU KIP Secara Spesifik Mengatur Ancaman Pidana Informasi	23
16	25 Januari 2020	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/01/25/ketua-komisi-informasi-ki-provinsi-jawa-barat-ijangfaisal-menanggapi-bocornya-sprin-lidik-kasus-ott-komisioner-kpu-oleh	Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal Menanggapi Bocornya Sprin Lidik Kasus OTT Komisioner KPU oleh	

			kpk/	KPK	
17	25 Januari 2020	Online (WJToday)	http://wjtoday.com/berita/8649/ijang-faisal-pembocor-surat-perintah-lidik-kpk-bisa-dihukum-2-tahun-penjara	Pembocor Surat Perintah Lidik KPK Bisa dihukum 2 Tahun Penjara	
18	26 Januari 2020	Online (prabunews.com)	https://www.prabunews.com/2020/01/25/uu-kip-secara-spesifik-mengatur-ancaman-pidana-informasi/	UU KIP Secara Spesifik Mengatur Ancaman Pidana Informasi	
19	26 Januari 2020	Online (Indonesia Express Com)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/01/26/info-mewabahnya-virus-corona-merupakan-jenis-informasi-serta-merta-badan-publik-wajib-dengan-segera-memberikan-informasi-kepada-publik/	Info Mewabahnya Virus Corona Merupakan Jenis Informasi Serta Merta. Badan Publik Wajib Dengan Segera Memberikan Informasi Kepada Publik	102
20	26 Januari 2020	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/01/26/informasi-mewabahnya-virus-corona-merupakan-jenis-informasi-serta-merta-badan-publik-wajib-memberikan-informasi-kepada-publik/	Info Mewabahnya Virus Corona Merupakan Jenis Informasi Serta Merta. Badan Publik Wajib Dengan Segera Memberikan Informasi Kepada Publik	
21	27 Januari 2020	Online (WJToday)	http://wjtoday.com/berita/8713/k-jabar-badan-publik-wajib-segera-berikan-kepada-masyarakat-informasi-virus-corona	Badan Publik Wajib Segera Berikan Kepada Masyarakat Informasi Virus Corona	
22	29 Januari 2020	Online (JoernalInakor.com)	https://joernalinakor.com/komisi-informasi-jawa-barat-ke-komisi-informasi-pusat-bawa-empat-misi/	Komisi Informasi Jawa Barat Ke Komisi Informasi Pusat Bawa Empat Misi	15
23	29 Januari 2020	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/01/29/ijang-faisal-uu-kip-secara-spesifik-mengatur-ancaman-hukuman-pidana-informasi/	Ijang Faisal: UU KIP Secara Spesifik Mengatur Ancaman Hukuman Pidana Informasi	29

24	29 Januari 2020	Online (InilahKoran)	https://www.inilahkoran.com/berita/40569/ki-jabar-nyatakan-siap-jadi-tuan-rumah-rakornas-ke-pusat	KI Jabar Nyatakan Siap Jadi Tuan Rumah Rakornas ke Pusat	
25	01-Feb-20	Online (bpknews)	https://bpkpnews.com/2020/02/01/mendeskripsikan-program-komisi-informasi-jawa-barat-ketua-ki-temui-kepala-bappeda-jabar/	Mendeskripsikan Program Komisi Informasi Jawa Barat, Ketua KI Temui Kepala BAPPEDA Jabar	
26	01-Feb-20	Online (Indonesia Express.co.id)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/02/01/mendeskripsikan-program-komisi-informasi-jawa-barat-ketua-ki-temui-kepala-bappeda-jabar/	Mendeskripsikan Program Komisi Informasi Jawa Barat, Ketua KI Temui Kepala BAPPEDA Jabar	77
27	10-Feb-20	Online (prabunews.com)	https://www.prabunews.com/2020/02/03/pentingnya-mendorong-keterbukaan-informasi-ki-jabar-teken-kontrak-kerjasama-dengan-dua-lembaga-badan-publik-swasta/	Pentingnya Mendorong Keterbukaan Informasi, KI Jabar Teken Kontrak Kerjasama dengan Dua Lembaga Badan Publik Swasta	
28	03-Feb-20	Online (Indonesia Express.co.id)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/02/03/pentingnya-mendorong-keterbukaan-informasi-ki-jabar-teken-kontrak-kerjasama-dengan-dua-lembaga-badan-publik-swasta/	Pentingnya Mendorong Keterbukaan Informasi, KI Jabar Teken Kontrak Kerjasama dengan Dua Lembaga Badan Publik Swasta	325
29	03-Feb-20	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/pentingnya-mendorong-keterbukaan-informasi-ki-jabar-teken-kontrak-kerjasama-dengan-dua-lembaga-badan-publik-swasta/	Pentingnya Mendorong Keterbukaan Informasi, KI Jabar Teken Kontrak Kerjasama dengan Dua Lembaga Badan Publik Swasta	17
30	03-Feb-20	Online (Jabaronline.com)	https://jabaronline.com/regional/pentingnya-mendorong-keterbukaan-informasi-ki-jabar-teken-kontrak-kerjasama-dengan-dua-lembaga-badan-publik-swasta/	Pentingnya Mendorong Keterbukaan Informasi, KI Jabar Teken Kontrak Kerjasama dengan Dua Lembaga Badan Publik Swasta	20
31	03-Feb-20	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/02/03/kip-jabar-teken-kontrak-kerjasama-dengan-dua-lembaga-badan-publik-swasta/	KIP Jabar Teken Kontrak Kerjasama Dengan Dua Lembaga Badan Publik Swasta	50

32	04-Feb-20	Cetak (Pikiran Rakyat)		Perempuan Harus Cerdas dan Kritis	
33	04-Feb-20	Online (Media Padjajaran Nusantara Indonesia)	https://www.mediapadjajaran.com/2020/02/bertemu-kepala-diskominfo-jabar-ki.html?m=1	Bertemu Kepala Diskominfo Jabar, KI Jabar: Mensinergikan Program Kerja Dalam Rangka Pelayanan Informasi Publik	
34	04-Feb-20	Online (prabunews.com)	https://www.prabunews.com/2020/02/04/bertemu-kepala-diskominfo-jabar-ki-jabar-mensinergikan-program-kerja-dalam-rangka-pelayanan-informasi-publik/	Bertemu Kepala Diskominfo Jabar, KI Jabar: Mensinergikan Program Kerja Dalam Rangka Pelayanan Informasi Publik	
35	04-Feb-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/02/04/bertemu-kepala-diskominfo-jabar-ki-jabar-mensinergikan-program-kerja-dalam-rangka-pelayanan-informasi-publik/	Bertemu Kepala Diskominfo Jabar, KI Jabar: Mensinergikan Program Kerja Dalam Rangka Pelayanan Informasi Publik	
36	06-Feb-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/02/06/perselisihan-sengketa-informasi-antara-warga-kampung-pilar-dengan-pengadilan-negeri-bekasi-akhirnya-disidangkan-di-komisi-informasi-jawa-barat/	Perselisihan Sengketa Informasi antara Warga Kampung Pilar dengan Pengadilan Negeri Bekasi akhirnya disidangkan di Komisi Informasi Jawa Barat	
37	06-Feb-20	Online (FIXINDONESIA.COM)	https://www.fixindonesia.com/sengketa-informasi-warga-bekasi-dengan-pengadilan-negeri-bekasi-akhirnya-disidangkan/	Sengketa Informasi Warga Bekasi dengan PN Bekasi Akhirnya Disidangkan	
38	08-Feb-02	Online (InilahKoran)	https://www.inilahkoran.com/berita/41750/penyelesaian-sengketa-informasi-warga-kampung-pilar-dan-pn-bekasi-masuk-meja-ki-jabar	Penyelesaian Sengketa Informasi Warga Kampung Pilar dan PN Bekasi Masuk Meja KI Jabar	
39	08-Feb-20	Online (Medikomonline)	http://medikomonline.com/news/pendidikan/disdik-jabar-tak-hadiri-sidang-ajudikasi-sengketa-informasi	Disdik Jabar tak Hadiri Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi	

40	11-Feb-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/02/11/ketua-umum-bpkp-mengunjungi-kantor-komisi-informasi-provinsi-jawa-barat/	Ketua Umum BPKP Mengunjungi Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	
41	12-Feb-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/02/12/dilanjutkan-ke-sidang-ajudikasi-non-litigasi-komisi-informasi-provinsi-jawa-barat/	Dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	
42	12-Feb-20	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/gagal-mediasi-perihal-sengketa-informasi-dilanjutkan-ke-sidang-ajudikasi-non-litigasi-komisi-informasi-provinsi-jawa-barat/	Gagal Mediasi Perihal Sengketa Informasi dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	20
43	13-Feb-20	Online (fixindonesia.com)	https://www.fixindonesia.com/sengketa-informasi-terhadap-kantor-atr-bpn-lanjut-ke-sidang-ajudikasi-non-litigasi/	Sengketa Informasi Terhadap Kantor ATR/BPN Lanjut ke Sidang Ajudikasi Non Litigasi	
44	13-Feb-20	Online (InilahKoran)	https://www.inilahkoran.com/berita/42301/mediasi-mandek-sengketa-informasi-terhadap-kantor-atrbpn-lanjut-ke-sidang-non-litigasi	Mediasi Mandek, Sengketa Informasi Terhadap Kantor ATR/BPN Lanjut ke Sidang Non-Litigasi	
45	14-Feb-20	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/ketua-komisi-informasi-jawa-barat-respons-positif-pelantikan-ivan-wangsa-sebagai-sekda-jabar/	Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Respons Positif Pelantikan Iwan Wangsa Sebagai Sekda Jabar	18
46	14-Feb-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/02/14/ketua-komisi-informasi-jawa-barat-respons-positif-pelantikan-ivan-wangsa-sebagai-sekda-jabar/	Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Respons Positif Pelantikan Iwan Wangsa Sebagai Sekda Jabar	
47	14-Feb-20	Online (Indonesia Express.co.id)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/02/14/ketua-komisi-informasi-jawa-barat-respons-positif-pelantikan-ivan-wangsa-sebagai-sekda-jabar/	Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Respons Positif Pelantikan Iwan Wangsa Sebagai Sekda Jabar	152

48	14-Feb-20	Online (suara pasundan.com)	https://www.suarapasundan.com/2020/02/ketua-kpid-jabar-respons-positif-pelantikan-iwan-wangsa-sebagai-sekda-jabar/	Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Respons Positif Pelantikan Iwan Wangsa Sebagai Sekda Jabar	130
49	15-Feb-20	Online (TribunJabar.id)	https://jabar.tribunnews.com/2020/02/15/ketua-komisi-informasi-jawa-barat-respons-positif-pelantikan-iwan-wangsa-sebagai-sekda-jabar	Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Respons Positif Pelantikan Iwan Wangsa Sebagai Sekda Jabar	
50	15-Feb-20	Online (Jabaronline.com)	https://jabaronline.com/regional/ketua-komisi-informasi-jawa-barat-respons-positif-pelantikan-iwan-wangsa-sebagai-sekda-jabar/	Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Respons Positif Pelantikan Iwan Wangsa Sebagai Sekda Jabar	11
51	18-Feb-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/02/18/ki-jabar-melakukan-pemeriksaan-setempat-di-kecamatan-sawanganperiksa-sengketa-permohonan-informasi-terkait-salinan-sah-ajb/	KI Jabar Melakukan Pemeriksaan Setempat Di Kecamatan Sawangan di Kecamatan Sawangan, Periksa Sengketa Permohonan Informasi Terkait Slinan Sah AJB	59
52	18-Feb-20	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/ki-jabar-melakukan-pemeriksaan-setempat-di-kecamatan-sawangan-periksa-sengketa-permohonan-informasi-terkait-salinan-sah-ajb/	KI Jabar Melakukan Pemeriksaan Setempat Di Kecamatan Sawangan di Kecamatan Sawangan, Periksa Sengketa Permohonan Informasi Terkait Slinan Sah AJB	49
53	18-Feb-20	Online (bcpknews)	https://bcpknews.com/2020/02/18/komisi-informasi-jawa-barat-periksa-sengketa-permohonan-informasi-terkait-salinan-sah-ajb/	Komisi Informasi Jawa Barat Periksa Sengketa Permohonan Informasi Terkait Salinan Sah AJB	
54	18-Feb-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/02/18/ki-jabar-melakukan-pemeriksaan-setempat-di-kecamatan-sawanganperiksa-sengketa-permohonan-informasi-terkait-salinan-sah-ajb/	KI Jabar Melakukan Pemeriksaan Setempat Di Kecamatan Sawangan di Kecamatan Sawangan, Periksa Sengketa Permohonan Informasi Terkait Slinan Sah AJB	60

55	24-Feb-20	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/ki-jabar-bertemu-kadiskominfo-cianjur-bahas-keterbukaan-informasi-publik-di-kabupaten-cianjur/	KI Jabar Bertemu Kadiskominfo Cianjur, Bahas Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cianjur	51
56	24-Feb-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/02/24/bahas-keterbukaan-informasi-publik-di-kabupaten-cianjurki-jabar-adakan-pertemuan-dengan-diskominfo-cianjur/	Bahas Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cianjur, KI Jabar adakan Pertemuan dengan Diskominfo Cianjur	46
57	24-Feb-20	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/ki-jabar-bertemu-kadiskominfo-cianjur-bahas-keterbukaan-informasi-publik-di-kabupaten-cianjur/	KI Jabar Bertemu Kadiskominfo Cianjur, Bahas Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cianjur	41
58	24-Feb-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/02/24/bahas-keterbukaan-informasi-publik-di-kabupaten-cianjurki-jabar-adakan-pertemuan-dengan-diskominfo-cianjur/	Bahas Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cianjur, KI Jabar adakan Pertemuan dengan Diskominfo Cianjur	47
59	24-Feb-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/02/24/ki-jabar-bertemu-kadiskominfo-cianjur-bahas-keterbukaan-informasi-publik-di-kabupaten-cianjur/	KI Jabar Bertemu Kadiskominfo Cianjur, Bahas Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cianjur	43
60	25-Feb-20	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/komisi-informasi-provinsi-jawa-barat-ajak-masyarakat-cianjur-dalam-seminar-keterbukaan-informasi-publik/	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Ajak Masyarakat Cianjur Dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik	
61	25-Feb-20	Online (InilahKoran)	https://www.inilahkoran.com/berita/43554/dorong-keterbukaan-informasi-ki-jabar-kunjungi-kabupaten-cianjur	Dorong Keterbukaan Informasi, KI Jabar Kunjungi Kabupaten Cianjur	
62	25-Feb-20	Online (Joernal Inakor)	https://joernalinakor.com/komisi-informasi-provinsi-jawa-barat-ajak-masyarakat-cianjur-dalam-seminar-keterbukaan-informasi-publik/	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Ajak Masyarakat Cianjur Dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik	21

63	25-Feb-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/02/25/bersama-masyarakat-cianjur-ketua-ki-jabar-ajak-masyarakat-cianjur-bersinergi-dan-menjadi-agen-keterbukaan-di-cianjur/	Bersama Masyarakat Cianjur, Ketua KI Jabar Ajak Masyarakat Cianjur Bersinergi dan Menjadi Agen Keterbukaan di Cianjur	
64	26-Feb-20	Online (Sinar Lantang News)	https://sinarlantangnews.com/2020/02/26/bersama-masyarakat-cianjur-ketua-ki-jabar-ajak-masyarakat-cianjur-bersinergi-dan-menjadi-agen-keterbukaan-di-cianjur/	Bersama Masyarakat Cianjur, Ketua KI Jabar Ajak Masyarakat Cianjur Bersinergi dan Menjadi Agen Keterbukaan di Cianjur	
65	27-Feb-20	Online (rri.co.id)	http://rri.co.id/bandung/post/berita/792150/warta_jawa_barat/komisi_informasi_jabar_lakukan_seminar_keterbukaan_informasi.html	Komisi Informasi Jabar Lakukan Seminar Keterbukaan Informasi	
66	18-Apr-20	Online (WJ Today)	https://www.wjtoday.com/berita/11308/ki-jabar-pengeluaran-uang-negara-untuk-penanggulangan-covid-19-harus-terbuka	KI Jabar: Pengeluaran Uang Negara untuk Penanggulangan Covid-19 Harus Terbuka	
67	19-Apr-20	Online (Pikiran Rakyat)	https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01368225/rawan-penyelewengan-bantuan-penanganan-covid-19-mesti-diawasi-bersama	Rawan Penyelewengan, Bantuan Penanganan Covid-19 Mesti Diawasi Bersama	
68	19-Apr-20	Online (Tribuana News)	https://www.tribuananews.com/2020/04/ki-jabar-pengeluaran-uang-negara-untuk.html	KI Jabar: Pengeluaran Uang Negara untuk Penanggulangan Covid-19 Harus Terbuka	
69	20-Apr-20	Online (Members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/04/pengeluaran-uang-negara-untuk.html	Pengeluaran Uang Negara Untuk Penanggulangan COVID-19 Di Jawa Barat Harus Terbuka	
70	20-Apr-20	Online (Fixindonesia.com)	https://www.fixindonesia.com/bantuan-penanganan-covid-19/	KI Jabar: Bantuan Penanganan Covid-19 Rawan Penyelewengan	

71	20-Apr-20	Online (detik-nusantara.com)	http://detik-nusantara.com/2020/04/20/komisi-informasi-pengeluaran-uang-negara-untuk-penanggulangan-covid-19-di-jawa-barat-harus-terbuka/	KOMISI INFORMASI ; Pengeluaran Uang Negara Untuk Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat Harus Terbuka	
72	20-Apr-20	Online (Joernalinakor.com)	https://joernalinakor.com/pengeluaran-uang-negara-untuk-penanggulangan-covid-19-di-jawa-barat-harus-terbuka/	Pengeluaran Uang Negara Untuk Penanggulangan COVID-19 Di Jawa Barat Harus Terbuka	55
73	20-Apr-20	Online (Indonesiaexpres.co.id)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/04/pengeluaran-uang-negara-untuk-penanggulangan-covid-19-di-jawa-barat-harus-terbuka/	Pengeluaran Uang Negara Untuk Penanggulangan COVID-19 Di Jawa Barat Harus Terbuka	85
74	20-Apr-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/04/20/pengeluaran-uang-negara-untuk-penanggulangan-covid-19-di-jawa-barat-harus-terbuka/	Pengeluaran Uang Negara Untuk Penanggulangan COVID-19 Di Jawa Barat Harus Terbuka	58
75	08-Mei-20	Online (Members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/05/ki-jabar-dan-um-bandung-gelar-diskusi.html	KI JABAR Dan UMBANDUNG GELAR DISKUSI WEBINAR KETERBUKAAN INFORMASI Ditengah PANDEMI COVID-19	42
76	08-Mei-20	Online (wartapembaruan.com)	https://wartapembaruan.com/ki-jabar-dan-umbandung-gelar-diskusi-webinar-keterbukaan-informasi-di-tengah-pandemi-covid-19/	KI JABAR Dan UMBANDUNG GELAR DISKUSI WEBINAR KETERBUKAAN INFORMASI Ditengah PANDEMI COVID-19	
77	08-Mei-20	Online (nusantarachannel.com)	https://nusantarachannel.com/ki-jabar-umbandung-adakan-webinar-tentang-keterbukaan-informasi-covid-19/	KI Jabar & UMBandung Adakan Webinar Tentang Keterbukaan Informasi Covid-19	115
78	08-Mei-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/05/08/ki-jabar-dan-um-bandung-gelar-diskusi-webinar-keterbukaan-informasi-di-tengah-pandemi-covid-19/	KI JABAR Dan UMBANDUNG GELAR DISKUSI WEBINAR KETERBUKAAN INFORMASI Ditengah PANDEMI COVID-19	
79	08-Mei-20	Online (prabunews.com)	https://prabunews.com/2020/05/08/diskusi-webinar-fenomena-keterbukaan-informasi-publik-di-tengah-pandemi-covid-19/	Diskusi Webinar "Fenomena Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Pandemi Covid-19"	

80	08-Mei-20	Online (putraindo news)	http://putraindonews.com/2020/05/08/keterbukaan-informasi-di-tengah-pandemi-covid-19/	Keterbukaan Informasi Di Tengah Pandemi COVID-19	
81	08-Mei-20	Online (siliwanginews)	https://siliwanginews.com/2020/05/08/ijang-faisal-ki-jabar-dan-umbandung-gelar-diskusi-webinar-keterbukaan-informasi-di-tengah-pandemi-covid-19/	IJANG FAISAL , KI Jabar Dan UMBandung Gelar Diskusi Webinar Keterbukaan Informasi di tengah Pandemi COVID 19	
82	08-Mei-20	Online (Inilahkoran.co m)	https://www.inilahkoran.com/berita/50995/gelar-diskusi-ki-jabar-dorong-keterbukaan-informasi-penanganan-covid-19	Gelar Diskusi, KI Jabar Dorong Keterbukaan Informasi Penanganan Covid-19	
83	08-Mei-20	Online (wjtoday.com)	https://www.wjtoday.com/berita/11699/keterbukaan-informasi-di-tengah-pandemi-covid-19	Keterbukaan Informasi di Tengah Pandemi Covid-19	
84	08-Mei-20	Online (timesindonesi a.co.id)	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/270287/komisi-informasi-jabar-gelar-webinar-fenomena-kip-di-tengah-pandemi-covid19	Komisi Informasi Jabar Gelar Webinar Fenomena KIP di Tengah Pandemi Covid-19	32.43
85	15-Mei-20	Online (Members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/05/makin-terbuka-penyelenggaraan-negara.html	MAKIN TERBUKA PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK DIAWASI PUBLIK MAKA PENYELENGGARAAN NEGARA TERSEBUT MAKIN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKA N	26,76 k
86	15-Mei-20	Online (siliwangi news)	https://siliwanginews.com/2020/05/15/ijang-faisal-makin-terbuka-penyelenggaraan-negara-untuk-diaawasi-publik-maka-penyelenggaraan-negara-tersebut-makin-dapat-dipertanggungjawabkan/	IJANG FAISAL ; MAKIN TERBUKA PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK DIAWASI PUBLIK MAKA PENYELENGGARAAN NEGARA TERSEBUT MAKIN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKA N	

87	15-Mei-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/05/15/makin-terbuka-penyelenggaraan-negara-untuk-diawasi-publik-maka-penyelenggaraan-negara-tersebut-makin-dapat-dipertanggungjawabkan/	MAKIN TERBUKA PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK DIAWASI PUBLIK MAKA PENYELENGGARAAN NEGARA TERSEBUT MAKIN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	28
88	15-Mei-20	Online (Jabaronline.com)	https://jabaronline.com/regional/penyelenggaraan-negara-makin-terbuka-untuk-diawasi-makin-dipertanggungjawabkan/	Penyelenggaraan Negara Makin Terbuka Untuk Diawasi & Makin Dipertanggung Jawabkan	37
89	15-Mei-20	Online (Indonesiaexpress.co.id)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/05/makin-terbuka-penyelenggaraan-negara-untuk-diawasi-publik-maka-penyelenggaraan-negara-tersebut-makin-dapat-dipertanggungjawabkan/	MAKIN TERBUKA PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK DIAWASI PUBLIK MAKA PENYELENGGARAAN NEGARA TERSEBUT MAKIN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	98
90	15-Mei-20	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/05/15/ki-jabar-hak-setiap-orang-untuk-mendapatkan-informasi-harus-relevan/	KI Jabar : Hak Setiap Orang Untuk Mendapatkan Informasi Harus Relevan	54
91	15-Mei-20	Online (putraindonews)	http://putraindonews.com/2020/05/15/penyelenggaraan-yang-terbuka-akan-memudahkan-pertanggungjawaban/	PENYELENGGARAAN YANG TERBUKA AKAN MEMUDAHKAN PERTANGGUNGJAWABAN	
92	16-Mei-20	Online (timesindonesia.co.id)	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/272014/komisi-informasi-jabar-gelar-webinar-kebijakan-dan-informasi-pendidikan	Komisi Informasi Jabar Gelar Webinar Kebijakan dan Informasi Pendidikan, (Views : 3.98k)	23.51
93	16-Mei-20	Online (Members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/05/kembali-ki-provinsi-jawa-barat.html	KEMBALI, KI PROVINSI JAWA BARAT MENGGELAR WEBINAR BERSETIFIKAT BERTEMA "KETIKA PEREMPUAN MEREBut INFORMASI"	18,30 k

94	16-Mei-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/05/16/komisi-informasi-jawa-barat-gelar-webinar-bertema-ketika-perempuan-merebut-informasi/	KOMISI INFORMASI JAWA BARAT GELAR WEBINAR BERTEMA "KETIKA PEREMPUAN MEREBut INFORMASI"	
95	16-Mei-20	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/05/16/webinar-ki-jabar-ketika-perempuan-merebut-informasi/	Webinar Ki Jabar 'Ketika Perempuan Merebut Informasi'	45
96	16-Mei-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/05/16/memotivasi-ki-provinsi-jabar-kembali-gelar-webinar-bersertifikat-bertema-ketika-perempuan-merebut-informasi/	MEMOTIVASI, KI PROVINSI JABAR KEMBALI GELAR WEBINAR BERSERTIFIKAT BERTEMA "KETIKA PEREMPUAN MEREBut INFORMASI"	103
97	16-Mei-20	Online (Indonesiaexpres.co.id)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/05/memotivasi-ki-provinsi-jabar-kembali-gelar-webinar-bersertifikat-bertema-ketika-perempuan-merebut-informasi/	MEMOTIVASI, KI PROVINSI JABAR KEMBALI GELAR WEBINAR BERSERTIFIKAT BERTEMA "KETIKA PEREMPUAN MEREBut INFORMASI"	86
98	17-Mei-20	Online (putraindonesia)	http://putraindonesia.com/2020/05/17/ketika-perempuan-merebut-informasi/	"KETIKA PEREMPUAN MEREBut INFORMASI"	56
99	17-Mei-20	Online (wjtoday)	https://www.wjtoday.com/berita/11887/komisi-informasi-jabar-ketika-perempuan-merebut-informasi	Komisi Informasi Jabar: Ketika Perempuan Merebut Informasi	
100	17-Mei-20	Online (detik Indonesia)	http://detikindonesia.co/2020/05/17/komisi-informasi-jabar-gelar-webinar-bersertifikat/	Komisi Informasi Jabar Gelar Webinar Bersertifikat.	
101	24-Jun-20	Online (Members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/06/sengketa-lbh-jakarta-dengan-pemprov.html	SENGKETA LBH JAKARTA DENGAN PEMPROV JABAR DILAKUKAN SECARA VIRTUAL	
102	24-Jun-20	Online (suara Indonesia)	https://www.suaraindonesia.co.id/read/17969/20200624/224736/terkait-penagulangan-banjir-ki-jabar-gelar-sidang-perdana-secara-virtual--lbh-jakarta-dengan-pemprov-jabar#!-	Terkait Penagulangan Banjir, KI Jabar Gelar Sidang Perdana Secara Virtual, (Views :625)	

103	24-Jun-20	Online (seputarNews.Com)	http://www.seputarnews.com/lbh-jakarta-gelar-persidangan-sengketa-informasi-publik-dengan-komisi-informasi-ki-jabar-lewat-elektronik/	LBH Jakarta Gelar Persidangan Sengketa Informasi Publik dengan Komisi Informasi (KI) Jabar Lewat Elektronik	1,44 k
104	24-Jun-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/06/24/sengketa-lbh-jakarta-dengan-pemprov-jabar-dilakukan-secara-online/	SENGKETA LBH JAKARTA DENGAN PEMPROV JABAR DILAKUKAN SECARA VIRTUAL	
105	24-Jun-20	Online (media Top News)	https://mediatopnews.com/sengketa-lbh-jakarta-dengan-pemprov-jabar-dilakukan-secara-online	Sengketa LBH Jakarta dengan Pemprov Jabar Dilakukan Secara Online	
106	24-Jun-20	Online (penaku.id)	https://penaku.id/sengketa-informasi-publik-antara-lbh-jakarta-vs-pemprov-jabar-di-gelar-online/	Sengketa Informasi Publik Antara LBH Jakarta Vs Pemprov Jabar di Gelar Online	
107	24-Jun-20	Online (suaramudane ws)	https://suaramudanews.com/2020/06/sengketa-lbh-jakarta-dengan-komisi-informasi-jabar-dilakukan-secara-online/	Sengketa LBH Jakarta dengan Komisi Informasi Jabar Dilakukan Secara Online, (Views : 39)	13
108	25-Jun-20	Online (putraindonews)	http://putraindonews.com/2020/06/25/p-dan-t-sepakat-penyelesaian-sengketa-di-ki-dapat-dilakukan-secara-virtual/	P dan T Sepakat, Penyelesaian Sengketa di KI Dapat Dilakukan Secara Virtual	
109	25-Jun-20	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/06/25/ki-jabar-gelar-sidang-perdana-secara-virtual-lbh-jakarta-dengan-pemprov-jabar/	KI Jabar Gelar Sidang Perdana Secara Virtual LBH Jakarta Dengan Pemprov Jabar	26
110	25-Jun-20	Online (indonesiaexpres.co.id)	https://indonesiaexpres.co.id/2020/06/ki-jawa-barat-memutus-sengketa-informasi-antara-warga-kampung-pilar-bekasi-dengan-pengadilan-negeri-bekasi/	KI Jawa Barat Memutus Sengketa Informasi Antara Warga Kampung Pilar Bekasi Dengan Pengadilan Negeri Bekasi	293
111	25-Jun-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/06/25/sengketa-lbh-jakarta-dengan-pemprov-jabar-dilakukan-secara-online/	Sengketa LBH Jakarta dengan Pemprov Jabar Dilakukan Secara Online	189
112	25-Jun-20	Online (members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/06/penjelasan-ki-jawa-barat-memutus.html	PENJELASAN KI JAWA BARAT MEMUTUS SENGKETA INFORMASI ANTARA WARGA KAMPUNG PILAR BEKASI DENGAN PENGADILAN NEGERI	33

				BEKASI	
113	11-Sep-20	Online (Members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/09/bangun-sinergiritas-di-pilkada-2020-ki.html	Bangun Sinergiritas di Pilkada 2020, KI Jabar dan Bawaslu Jabar Tandatangani Kesepahaman Bersama Informasi Publik	
114	11-Sep-20	Online (fokussatu.id)	https://fokussatu.id/2020/09/11/tandatangani-kesepahaman-bersama-keterbukaan-informasi-publik-antara-ki-dan-bawaslu-jabar/	Tandatangani Kesepahaman Bersama Keterbukaan Informasi Publik antara KI dan Bawaslu Jabar	
115	11-Sep-20	Online (bandungrayanews.com)	http://bandungrayanews.com/terus-kerjasama-keterbukaan-informasi-publik-antara-ki-dan-bawaslu-jabar/	Terus Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik antara KI dan Bawaslu Jabar	
116	11-Sep-20	Online (jabar.suaraindonesia.co.id)	http://jabar.suaraindonesia.co.id/read/20907/20200911/083931/ki-jabar-dan-bawaslu-jabar-tandatangani-nota-kesepahaman-bersama-untuk-pilkada-serentak-2020	KI Jabar dan Bawaslu Jabar Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama Untuk Pilkada Serentak 2020	
117	11-Sep-20	Online (suaramudanews)	https://suaramudanews.com/2020/09/pilkada-serentak-2020-ki-jabar-dan-bawaslu-tandatangani-kesepahaman-bersama-informasi-publik/	Pilkada Serentak 2020, KI Jabar dan Bawaslu Tandatangani Kesepahaman Bersama Informasi Publik	
118	11-Sep-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/09/11/komisi-informasi-jawa-barat-dan-bawaslu-provinsi-jawa-barat-tanda-tangani-kesepahaman-bersama-keterbukaan-informasi-publik-pada-pilkada-serentak-2020/	KI Jabar dan Bawaslu Jabar Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama Untuk Pilkada Serentak 2020	52
119	11-Sep-20	Online (fokussatu.id)	https://fokussatu.id/2020/09/11/sosialisasi-virtual-monev-komisi-informasi-provinsi-jawa-barat-tahun-2020/	Sosialisasi Virtual Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	17

120	11-Sep-20	Online (Members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/09/kegiatan-sosialisasi-monev-komisi.html	Kegiatan, Sosialisasi Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2020	
121	11-Sep-20	Online (timesindonesia.co.id)	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/295889/komisi-informasi-jabarbawaslu-sepakat-kawal-pilkada-serentak	Komisi Informasi Jabar-Bawaslu Sepakat Kawal Pilkada Serentak	9,17k
122	14-Sep-20	Online (timesindonesia.co.id)	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/296502/komisi-informasi-jabar-evaluasi-118-lembaga-publik	Komisi Informasi Jabar Evaluasi 118 Lembaga Publik di Jawa Barat	5,86k
123	18-Sep-20	Online (suarajabar.id)	https://jabar.suara.com/read/2020/09/18/110258/ki-jabar-evaluasi-layanan-informasi-badan-publik-di-masa-pandemi-covid-19	KI Jabar Evaluasi Layanan Informasi Badan Publik di Masa Pandemi Covid-19	10,68k
124	18-Sep-20	Online (forumkeadilan.com)	https://forumkeadilan.com/2020/09/ki-jabar-evaluasi-layanan-informasi-ratusan-badan-publik-di-masa-pandemi/	KI Jabar Evaluasi Layanan Informasi Ratusan Badan Publik di Masa Pandemi	
125	18-Sep-20	Online (sisibaik.id)	https://sisibaik.id/2020/09/18/komisi-informasi-jabar-evaluasi-ratusan-badan-publik-di-masa-pandemi/	KOMISI INFORMASI JABAR EVALUASI RATUSAN BADAN PUBLIK DI MASA PANDEMI	
126	18-Sep-20	Online (simmanews.com)	https://www.simmanews.com/komisi-informasi-evaluasi-kinerja-118-badan-publik-di-jabar/	Komisi Informasi evaluasi kinerja 118 badan publik di Jabar	
127	19-Sep-20	Online (members TV News)	https://www.memberstvnews.com/2020/09/sebanyak-118-badan-pelayanan-informasi.html	Sebanyak 118 Badan Pelayanan Informasi Publik di Jabar akan Dievaluasi KI Jabar	
128	19-Sep-20	Online (nyarink.com)	https://www.nyarink.com/2020/09/komisi-informasi-provinsi-jabar.html	KOMISI INFORMASI JABAR EVALUASI RATUSAN BADAN PUBLIK DI MASA PANDEMI	
129	19-Sep-20	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/09/19/ki-jabar-siap-evaluasi-118-badan-informasi-publik/	KI Jabar Siap Evaluasi 118 Badan Informasi Publik	23
130	19-Sep-20	Online (prabunews.com)	https://prabunews.com/2020/09/19/komisi-informasi-jabar-evaluasi-ratusan-badan-publik-di-masa-pandemi/	Komisi Informasi Jabar Evaluasi Ratusan Badan Publik di Masa Pandemi	22

131	19-Sep-20	Online (infoindonesia news.com)	http://infoindonesianews.com/komisi-informasi-provinsi-jabar-evaluasi-ratusan-badan-publik-di-masa-pandemi/	KOMISI INFORMASI PROVINSI JABAR EVALUASI RATUSAN BADAN PUBLIK DI MASA PANDEMI	3
132	19-Sep-20	Online (putraindonew s)	http://putraindonews.com/2020/09/19/118-badan-informasi-publik-akan-dievaluasi-ki-jabar/	118 BADAN INFORMASI PUBLIK akan Dievaluasi KI Jabar	
133	19-Sep-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/09/19/ki-jabar-evaluasi-118-layanan-informasi-badan-publik-di-masa-pandemi-covid-19/	KI Jabar Evaluasi 118 Layanan Informasi Badan Publik di Masa Pandemi Covid-19	44
134	22-Sep-20	Online (Kabarbhayang kara.com)	http://www.kabarbhayangkara.com/ki-jabar-akan-meminta-paslon-pemilukada-2020-sampaikan-kampanye-keterbukaan-informasi-publik/	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilukada 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	36
135	22-Sep-20	Online (wartaindonesi a)	https://warta.in/ki-jabar-akan-meminta-paslon-pemilukada-2020-sampaikan-kampanye-keterbukaan-informasi-publik/	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilukada 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	
136	22-Sep-20	Online (nyarink.com)	https://www.nyarink.com/2020/09/ki-jabar-akan-meminta-paslon-pemilukada.html	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilukada 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	
137	22-Sep-20	Online (prabunews.co m)	https://www.facebook.com/645382232548201/posts/1079120135841073/?sfnsn=wiwspmo&extid=7AdETIhdBbbmDU13	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilukada 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	
138	22-Sep-20	Online (prabunews.co m)	https://prabunews.com/2020/09/22/ki-jabar-akan-meminta-paslon-pemilukada-2020-sampaikan-kampanye-keterbukaan-informasi-publik/	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilukada 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	
139	23-Sep-20	Online (Tribuana News)	https://www.tribuananews.com/2020/09/ki-jabar-minta-paslon-pilkada-2020.html	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilukada 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	

140	23-Sep-20	Online (TribunJabar.id)	https://jabar.tribunnews.com/2020/09/22/ki-jabar-akan-meminta-paslon-pemilukada-2020-sampaikan-kampanye-keterbukaan-informasi-publik	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilu 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	
141	23-Sep-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/09/22/ki-jabar-akan-meminta-paslon-pemilukada-2020-sampaikan-kampanye-keterbukaan-informasi-publik/	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilu 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	
142	23-Sep-20	Online (wj today)	https://www.wjtoday.com/berita/15508/ki-jabar-ingatkan-calon-kepala-daerah-soal-keterbukaan-informasi-publik	KI Jabar Ingatkan Calon Kepala Daerah Soal Keterbukaan Informasi Publik	
143	23-Sep-20	Online (timesindonesia.co.id)	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/298112/ki-jabar-minta-paslon-pilkada-serentak-kampanyekan-keterbukaan-informasi-publik	KI Jabar Minta Paslon Pilkada Serentak Kampanyekan Keterbukaan Informasi Publik	21,5k
144	23-Sep-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/09/23/ki-jabar-akan-meminta-paslon-pemilukada-2020-sampaikan-kampanye-keterbukaan-informasi-publik/	KI Jabar Akan Meminta Paslon Pemilu 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	12,86k
145	23-Sep-20	Online (suaraindonesia)	https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/5f6ac7a0de0eb/keterbukaan-informasi-publik-ki-jabar--jika-terpilih--bupati-dan-walikota-jangan-hanya-isu-musiman	Keterbukaan Informasi Publik, KI Jabar: Jika Terpilih Bupati Dan Walikota Jangan Hanya Isu Musiman	13
146	24-Sep-20	Online (inilah koran)	https://www.inilahkoran.com/berita/62182/ki-jabar-minta-paslon-pilkada-serentak-2020-sampaikan-keterbukaan-informasi-publik	KI Jabar Minta Paslon Pilkada Serentak 2020 Sampaikan Keterbukaan Informasi Publik	
147	02-Okt-20	Online (wj today)	https://www.wjtoday.com/berita/15834/ijang-faisal-sebanyak-49-badan-publik-di-jabar-tidak-mau-terbuka	Ijang Faisal :Sebanyak 49 Badan Publik di Jabar Tidak Mau Terbuka	

148	02-Okt-20	Online (suara Indonesia)	https://suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/5f76a1e304cd6/49-badan-publik-belum-kembalikan-kuesioner-monev-ki-jabar--badan-publik-semua-harus-terbuka-	49 Badan Publik Belum Kembalikan Kuesioner Monev, Ki Jabar : Badan Publik Semua Harus Terbuka !	
149	02-Okt-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/10/02/ki-jabar-mengingat-49-badan-publik-yang-tidak-mengembalikan-kuesioner-monev-2020-untuk-terbuka/	KI Jabar Mengingat 49 Badan Publik Yang Tidak Mengembalikan Kuesioner Monev 2020 Untuk Terbuka	
150	02-Okt-20	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/10/02/ki-jabar-gelar-monitoring-dan-evaluasi-keterbukaan-49-badan-publik-belum-kembalikan-kuesioner-monev-2020/	KI Jabar Gelar Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan, 49 Badan Publik Belum Kembalikan Kuesioner Monev 2020	23
151	02-Okt-20	Online (nyarink.com)	https://www.nyarink.com/2020/10/02/ki-jabar-mengingat-49-badan-publik.html	KI Jabar Mengingat 49 Badan Publik Yang Tidak Mengembalikan Kuesioner Monev 2020	21
152	02-Okt-20	Online (Kabarbhayangkara.com)	http://www.kabarbhayangkara.com/ki-jabar-mengingat-49-badan-publik-yang-tidak-mengembalikan-kuesioner-monev-2020/	KI Jabar Mengingat 49 Badan Publik Yang Tidak Mengembalikan Kuesioner Monev 2020	
153	02-Okt-20	Online (timesindonesia.co.id)	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/300429/ki-jabar-minta-badan-publik-yang-tak-kembalikan-kuesioner-monev-2020-untuk-terbuka	KI Jabar Minta Badan Publik yang Tak Kembalikan Kuesioner Monev 2020 untuk Terbuka	19,48k
154	02-Okt-20	Online (prabunews.com)	https://prabunews.com/2020/10/02/ki-jabar-mengingat-49-badan-publik-yang-tidak-mengembalikan-kuesioner-monev-2020-untuk-terbuka/	KI Jabar Mengingat 49 Badan Publik Yang Tidak Mengembalikan Kuesioner Monev 2020 Untuk Terbuka	12,33k
155	02-Okt-20	Online (suara Indonesia)	https://suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/5f76a1e304cd6/49-badan-publik-belum-kembalikan-kuesioner-monev-ki-jabar--badan-publik-semua-harus-terbuka-	49 Badan Publik Belum Kembalikan Kuesioner Monev, Ki Jabar : Badan Publik Semua Harus Terbuka !	

156	02-Okt-20	Online (MBInews.id)	https://mbinews.id/2020/10/02/ki-jabar-gelar-monitoring-dan-evaluasi-keterbukaan-49-badan-publik-belum-kembalikan-kuesioner-monev-2020/	KI Jabar Gelar Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan, 49 Badan Publik Belum Kembalikan Kuesioner Monev 2020	23
157	02-Okt-20	Online (inilah koran)	https://www.inilahkoran.com/berita/62732/gara-gara-in-ki-jabar-ingatkan-49-badan-publik-untuk-terbuka	Gara Gara Ini, KI JABAR Ingatkan 49 Badan Publik Untuk Terbuka	21
158	02-Okt-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/10/02/ki-jabar-gelar-monitoring-dan-evaluasi-keterbukaan-informasi-publik/	KI Jabar Gelar Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	14
159	02-Okt-20	Online (simmanews)	https://www.simmanews.com/49-badan-publik-di-jabar-terindikasi-tidak-taat-uu-keterbukaan-informasi-publik/	49 Badan Publik di Jabar terindikasi tidak taat UU Keterbukaan Informasi Publik	11
160	02-Okt-20	Online (sisibaik.id)	https://sisibaik.id/2020/10/02/42-persen-badan-publik-di-jabar-tak-laporkan-kinerja-layanan-informasi/	42 PERSEN BADAN PUBLIK DI JABAR TAK LAPORKAN KINERJA LAYANAN INFORMASI	
161	02-Okt-20	Online (forumkeadilan.com)	https://forumkeadilan.com/2020/10/laporan-pelayanan-informasi-publik-di-jabar-masih-rendah/	Laporan Pelayanan Informasi Publik di Jabar Masih Rendah	
162	02-Okt-20	Online (suaramudanews)	https://suaramudanews.com/2020/10/ki-jabar-ingatkan-49-badan-publik-yang-tidak-mengembalikan-kuesioner-monev-2020/	KI Jabar Ingatkan 49 Badan Publik Yang Tidak Mengembalikan Kuesioner Monev 2020	
163	06-Okt-20	Online (pelitajabar.com)	https://pelitajabar.com/kip-jabar-68-badan-publik-telah-kembalikan-saq.html	KIP Jabar : 68 Badan Publik Telah Kembalikan SAQ	52
164	10-Okt-20	Online (TribunJabar.id)	https://jabar.tribunnews.com/2020/10/10/komisi-informasi-jabar-mengapresiasi-langkah-gubernur-jawa-barat-yang-merespons-aspirasi-publik	Komisi Informasi Jabar Mengapresiasi Langkah Gubernur Jawa Barat Yang Merespons Aspirasi Publik	
165	10-Okt-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/10/10/ki-jabar-mengapresiasi-langkah-gubernur-jawa-barat-yang-merespons-aspirasi-publik/	Komisi Informasi Jabar Mengapresiasi Langkah Gubernur Jawa Barat Yang Merespons Aspirasi Publik	

166	10-Okt-20	Online (wj today)	https://www.wjtoday.com/berita/16149/komisi-informasi-jabar-apresiasi-langkah-gubernur-jabar-dalam-merespons-aspirasi-publik	Komisi Informasi Jabar Mengapresiasi Langkah Gubernur Jawa Barat Yang Merespons Aspirasi Publik	
167	10-Okt-20	Online (suaraindonesia)	https://bandung.suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/5f81bc90c02ad/respon-aspirasi-publik-ki-jabar-apresiasi-gubernur-jabar-yang-kirim-surat-ke-presiden-ri	Respon Aspirasi Publik, KI Jabar Apresiasi Gubernur Jabar Yang Kirim Surat Ke Presiden RI	
168	10-Okt-20	Online (metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/10/10/respon-aspirasi-publik-ki-jabar-apresiasi-gubernur-jabar-yang-kirim-surat-ke-presiden-ri/	Respon Aspirasi Publik, KI Jabar Apresiasi Gubernur Jabar Yang Kirim Surat Ke Presiden RI	30
169	11-Okt-20	Online (fokussatu.id)	https://fokussatu.id/2020/10/11/ki-jabar-apresiasi-gubernur-jabar-kirim-surat-ke-presiden-joko-widodo/	KI Jabar Apresiasi Gubernur Jabar Kirim Surat Ke Presiden Joko Widodo	28
170	11-Okt-20	Online (jabar.siberindo)	https://jabar.siberindo.co/11/10/2020/ki-jabar-apresiasi-gubernur-jabar-kirim-surat-ke-presiden-joko-widodo/	KI Jabar Apresiasi Gubernur Jabar Kirim Surat Ke Presiden Joko Widodo	
171	11-Okt-20	Online (nyarink.com)	https://www.nyarink.com/2020/10/ki-jabar-mengapresiasi-langkah-gubernur.html	KI Jabar Mengapresiasi Langkah Gubernur Jabar Yang Merespons Aspirasi Publik	
172	12-Okt-20	Online (eljabar.com)	https://eljabar.com/komisi-informasi-jabar-desak-pemerintah-dan-dpr-transparan-soal-uu-cipta-kerja/	Komisi Informasi Jabar Desak Pemerintah dan DPR Transparan Soal UU Cipta Kerja	
173	12-Okt-20	Online (TribunJabar.id)	https://jabar.tribunnews.com/2020/10/12/komisi-informasi-desak-pemerintah-dan-dpr-transparan-soal-uu-cipta-kerja-kalau-bersih-kenapa-risih	Komisi Informasi Desak Pemerintah dan DPR Transparan Soal UU Cipta Kerja, Kalau Bersih Kenapa Risih?	
174	12-Okt-20	Online (wj today)	https://www.wjtoday.com/berita/16177/masyarakat-butuh-transparansi-uu-cipta-kerja-kalau-bersih-kenapa-harus-risih	Masyarakat Butuh Transparansi UU Cipta Kerja, Kalau Bersih Kenapa Harus Risih ?	

175	12-Okt-20	Online (suara Indonesia)	https://bandung.suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/5f844d600f274/rakyat-butuh-transparansi-uu-cipta-kerja-ki-jabar--kalau-bersih-kenapa-harus-risih	Masyarakat Butuh Transparansi UU Cipta Kerja, Kalau Bersih Kenapa Harus Risih ?	
176	12-Okt-20	Online (jabar.siberindo.co)	https://jabar.siberindo.co/12/10/2020/ki-jabar-rakyat-butuh-transparansi-uu-cipta-kerja-kalau-bersih-kenapa-harus-risih/	KI Jabar : Rakyat Butuh Transparansi UU Cipta Kerja, Kalau bersih kenapa harus risih?	
177	12-Okt-20	Online (timesindonesia.co.id)	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/302796/komisi-informasi-sebut-masyarakat-butuh-transparansi-uu-cipta-kerja	Komisi Informasi Sebut Masyarakat Butuh Transparansi UU Cipta Kerja	25,60k
178	12-Okt-20	Online (cnnindonesia)	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012235805-20-557630/komisi-informasi-jabar-minta-akses-draf-omnibus-law-dibuka	Komisi Informasi Jabar Minta Akses Draf Omnibus Law Dibuka	13,70k
179	04-Nov-20	Online (Patrolibins.co.id)	https://www.patrolibins.co.id/2020/11/kunjungan-komisi-informasi-ki-dan-tim.html	Kunjungan Komisi Informasi (KI) dan Tim Biro Humas Pemprov Jawa Barat Ke Kota Bekasi	
180	04-Nov-20	Online (Transparannews.id)	https://www.transparannews.id/bekasi/pemkot-bekasi-menerima-kunjungan-monev-tim-ki-dan-biro-humas-jabar/	Pemkot Bekasi Menerima Kunjungan Monev Tim KI dan Biro Humas Jabar	63
181	04-Nov-20	Online (Moeslimchoice.com)	https://www.moeslimchoice.com/read/2020/11/04/39268/pantau-penerapan-uu-kip-biro-humas-dan-tim-ki-jabar-sambangi-humas-pemkot-bekasi	Pantau Penerapan UU KIP, Biro Humas dan Tim KI Jabar Sambangi Humas Pemkot Bekasi	
182	20-Nov-20	Online (bpkpnews)	https://bpkpnews.com/2020/11/20/gubernur-ridwan-kamil-akan-memberikan-anugerah-keterbukaan-informasi-tingkat-jawa-barat/	Gubernur Ridwan Kamil Akan Memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Tingkat Jawa Barat	
183	20-Nov-20	Online (timesindonesia.co.id)	https://www.timesindonesia.co.id/read/news/310977/ridwan-kamil-akan-berikan-anugerah-keterbukaan-informasi-jawa-barat	Ridwan Kamil Akan Berikan Anugerah Keterbukaan Informasi Jawa Barat	18,45k

184	20-Nov-20	Online (bedanews.com)	https://bedanews.com/ijang-faisal-badan-publik-di-jabar-mayoritas-belum-maksimal-laksanakan-tupoksi/	Ijang Faisal: Badan Publik di Jabar Mayoritas Belum Maksimal Laksanakan Tupoksi	15,49k
185	21-Nov-20	Online (Metrojabar.id)	https://metrojabar.id/2020/11/21/gelar-pemeringkatan-badan-publik-hasil-monitoring-evaluasi-tahun-2020-ridwal-kamil-berikan-anugerah-keterbukaan-informasi-tingkat-jabar/	Gelar Pemeringkatan Badan Publik Hasil Monitoring Evaluasi Tahun 2020, Ridwal Kamil Berikan Anugerah Keterbukaan Informasi Tingkat Jabar	1k